

**MEMBANGUN BUDAYA  
DAMAI & REKONSILIASI**

**DASAR MENANGANI KONFLIK**

**di**

**PAPUA**

**REFLEKSI**

**NOVEMBER 2003**

**OLEH**

**SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian (SKP)**

**KEUSKUPAN JAYAPURA**

Tuhan,        jadikan       kami       alat-alat  
perdamaian-Mu.

Biarlah kami mengasihi di mana ada  
kebencian;  
Memaafkan di mana ada dendam;  
Mempersatukan di mana ada perpecahan;

Menimbulkan pengharapan di mana ada  
keputusasaan;  
Memberi iman di mana ada kebingungan;  
Membawa terang di mana ada kebimbangan;  
Memberi kegembiraan di mana ada  
kesedihan;

Biarlah kami jangan mencari

Untuk dihibur, melainkan menghibur;  
Untuk dipahami, melainkan memahami;  
Untuk dicintai, melainkan mencintai;  
Sebab di dalam memberi, kami menerima;  
Di dalam mengampuni, kami diampuni;

**Doa oleh Santo Fransiskus dari Asisi**

## KATA PENGANTAR

Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik. Menanggapi kenyataan demikian banyak pihak menggemakan semboyan “Papua Zona Damai” supaya segala permasalahan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, melainkan melalui pendekatan dialog dan penghargaan satu sama yang lain. Semboyan “Papua Zona Damai atau Papua Tanah Damai” didengungkan dimana-mana dan disambut dengan hangat oleh segala lapisan masyarakat. Sayangnya bahwa semboyan “Papua Tanah Damai” kadang – kadang dipakai sebagai slogan sehingga maknanya menjadi kabur. Akibatnya a.l. bahwa masyarakat yang diharapkan turut menjaga perdamaian di Papua sering tidak tahu dapat berbuat apa demi terwujudnya damai yang digemakan. Maka muncul bahaya bahwa perlahan – lahan maksud utama dari semboyan “Papua Tanah Damai” terkikis habis dan hilang maknanya.

Sambil menyadari adanya perkembangan – perkembangan yang kurang mendukung terwujudnya suasana damai di Papua, lembaga – lembaga yang peduli dengan perdamaian di Papua tidak ingin kehilangan gema semboyan Papua Tanah Damai. Karena dengan gema Papua Tanah Damai setidaknya dapat menggugah masyarakat Papua agar turut berpikir – berefleksi tentang perdamaian sambil terus mengembangkan niatnya untuk menyumbangkan dengan lebih berarti bagi perdamaian di Papua. Sebab tanpa partisipasi dari semua masyarakat, perdamaian sulit terwujud.

Dalam rangka partisipasi demi perdamaian itulah, buku “***Membangun Budaya Perdamaian dan Rekonsiliasi, menangani Konflik di Papua***” ditulis. Paparan yang disajikan dalam buku ini mau mengajak umat katolik untuk menjadikan Perdamaian dan Rekonsiliasi sebagai budaya dalam hidup bermasyarakat di Papua. Walaupun ditujukan kepada umat katolik, dari segi isinya, buku ini juga bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat di Papua secara umum. Dalam buku ini dipaparkan persoalan – persoalan yang dialami oleh masyarakat Papua setiap hari. Lagi pula menarik bahwa sejumlah unsur konkrit yang kiranya dapat digunakan sebagai pegangan guna menciptakan

Papua Tanah Damai pun diangkat, baik dalam lingkup keluarga, tempat kerja sebagai umat beriman maupun sebagai warga masyarakat papua.

Diharapkan bahwa buku ini akhirnya dapat membantu masyarakat secara luas untuk dapat berpartisipasi secara nyata menyumbangkan kemampuannya demi perdamaian di Papua. Semoga kerinduan masyarakat Papua untuk hidup damai dengan siapa saja di Tanah yang diberkati ini dapat terwujud, dan mendatangkan berkat bagi dunia.

Jayapura, 16 Desember 2003

# **MEMBANGUN BUDAYA DAMAI & REKONSILIASI**

## **DASAR MENANGANI KONFLIK<sup>1</sup>**

### **Pendahuluan**

*Papua merupakan salah satu medan konflik yang subur; dan mencakup berbagai segi kehidupan: kehidupan berumat (yang berbeda suku, agama dan budaya), kehidupan keluarga, dan lingkungan tempat kita bekerja, yang kadangkala menciptakan rasa ketakutan yang luarbiasa dalam kehidupan bersama setiap hari. Memang konflik sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Sebenarnya kenyataan ini tidak mengherankan karena adanya konflik semata-mata menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat kita terus dalam proses perubahan. Kehidupan kemasyarakatan dewasa ini lain daripada 50 tahun yang lalu. Setiap perubahan membaweserta suasana konflik; karena sesuatu yang 'sudah menjadi biasa' atau 'yang disayangi' mau diubah, atau tidak dapat dihindari akan berubah. Karena itu pastilah muncul protes. Orang protes karena takut akan dunia yang baru, atau protes karena ketenangan hidup mereka, kepentingan atau keistimewaannya diganggu atau dihilangkan. Kita semua masih mengingat betapa sulitnya peralihan dari Orde Baru ke Era Reformasi, yang ternyata belum mulus dapat dijalankan. Maka, selama kita masih hidup, wajar saja jika kita akan mengalami konflik dan perubahan pun pasti terjadi. Namun kita tidak perlu takut, karena konflik adalah bagian dari suatu proses alamiah, yang tinggal ditangani saja. Berdasarkan kenyataan ini, adalah sangat tepat pula bila pimpinan gereja mengajak umatnya supaya berefleksi mengenai segala upaya untuk mengatasi konflik-konflik yang ada di lingkungannya. Dengan demikian kita dapat menyumbangkan sesuatu yang makin berarti untuk terwujudnya dunia yang lebih **harmonis (rekonsiliasi) dan damai**.*

---

<sup>1</sup> Buku kecil ini disiapkan sebagai bahan pemikiran bagi refleksi umat katolik selama Masa Prapaskah tahun 2004.

## **BAB I**

### **KONFLIK DI TANAH PAPUA**

*Siapa saja yang tinggal di Tanah Papua dewasa ini sudah terbiasa dengan adanya konflik, dan mungkin juga menyimpan ingatan akan penderitaan, atau sebaliknya akan kegembiraannya sewaktu suatu konflik dapat diatasi. Ada bermacam-macam konflik; bagi seseorang sumber konflik terletak dalam kehidupan keluarga, sedangkan bagi yang lain konflik di tempat kerjanya; bagi yang lain lagi konflik terletak dalam hubungan pribadi dengan seseorang atau sekelompok orang. Pastilah ada juga yang merasa bahwa konflik utama dialami di tingkat ekonomi (pendapatan tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya secara layak) atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang lain, termasuk aspirasi serta harapannya ke depan. Dengan demikian konflik adalah teman hidup setiap warga di Papua.*

*Untuk menggambarkan secara lebih sistematis apa saja yang merupakan sumber-sumber konflik di Papua, kami membedakan empat sumber yang diuraikan seperti dibawah ini<sup>2</sup>:*

- [1] suasana peralihan (budaya)*
- [2] suasana kependudukan (kemajemukan)*
- [3] suasana sosial ekonomis (kesejahteraan)*
- [4] suasana sosial politik (hak-hak dasar)*

#### **SUASANA PERALIHAN**

*Bukan rahasia lagi bahwa dunia hari ini berbeda dengan dunia kita lima puluh tahun yang lalu. Kalau kita mengambil waktu untuk duduk dengan tenang sambil membicarakan masalah-masalah masa kini sering muncul cerita-cerita bahwa dahulu semuanya seakan-akan begitu jelas. Kita mempunyai adat yang dulunya dapat mengatur kehidupan bersama sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan kelestarian kehidupan baik perorangan maupun kelompok terjamin. Inti dari adat adalah sejumlah pegangan dan nilai yang diakui bersama dan ditegakan bersama; kepemimpinan, peraturan pergaulan, pembagian peluang ekonomi jelas dan melayani kesejahteraan para warga, pegangan religius yang terungkap dalam pelbagai seremoni adat. Para warga diantar masuk kedalam kehidupan sosial serta diajarkan tentang pegangan nilainya secara bertahap (melalui inisiasi, pendidikan dalam keluarga, dan seterusnya)<sup>3</sup>.*

---

<sup>2</sup> Tentu bahwa daftar sumber konflik ini jauh dari lengkap, namun kami membatasi diri dalam uraian ini dengan memberikan perhatian utama pada sejumlah sumber yang paling dekat dengan suasana / hati kita di Papua, dan dengan harapan bahwa gambaran ini, walau tidak lengkap, dapat membantu dalam refleksi kita mengenai suasana hidup baik sebagai umat, maupun warga masyarakat di Papua.

<sup>3</sup> Dalam konteks ini perlu digarisbawahi adanya mitos bahwa dunia masa lampau serba baik, aman dan damai sehingga masyarakat Papua biasa merujuk dengan 'adat' dan dunia kini yang serba kacau karena orang tidak tahu 'adat'. Senyatanya, konflik selalu ada dalam setiap komunitas manusia dimanapun dan kapanpun. Komunitas yang biasa tidak pernah homogen dan satu suara melainkan selalu majemuk dan berbagai suara. Kiranya dapat diterima bahwa kehidupan Papua 100 tahun lalu lebih sederhana

*Dunia dewasa ini terasa begitu berubah dari tahun-tahun lalu; sepertinya kita sudah kehilangan segala macam pegangan, karena pengaruh / tawaran begitu banyak dan bermacam-macam yang membuat kita menjadi bingung. Apalagi dengan bertambahnya sarana komunikasi, dunia kita makin diperluas sampai kita merasa “sesak nafas” untuk meresapi semuanya itu. Sangat melelahkan, terasa seakan-akan kita ditinggalkan dengan “tangan hampa”. Sangat terasa juga, kalau misalnya berhadapan dengan penyebaran pesat ‘penyakit maut’, HIV/AIDS, di Papua yang untuk sebagian bisa terjadi karena pegangan moral / kelakuan seksual ternyata tidak jelas lagi. Dulu dalam adat diatur dengan ketat, sekarang seks ‘dapat dibeli’ tanpa membawa konsekwensi / sanksi langsung bagi pribadi orangnya, namun membawa bahaya besar yang tersembunyi dan pelan-pelan menghancurkan kehidupan bersama. Apalagi ada yang lebih mudah menerima segala macam masukan yang baru ini, sehingga tercipta suatu kesenjangan antara generasi, antara anak dan orang tuanya, antara mereka yang terdidik dan yang tidak berpeluang untuk menikmati pendidikan bermutu.*

*Jelas bahwa segala perubahan yang begitu cepat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri kita maupun dalam kehidupan bersama, karena ternyata belum ditemukan suatu “adat baru” (pegangan nilai) yang diakui dan ditegakkan bersama<sup>4</sup>. Kesemrawutan ini sangat mengganggu dan membuat kebanyakan dari antara kita bermimpi kembali kepada suasana dahulu kala. Namun, rupanya kita dipanggil untuk hidup pada hari ini dalam suasana abad keduapuluhsatu, maka kita tidak luput dari perjuangan pribadi maupun bersama untuk mencari jalan dalam sejarah dewasa ini. Namun tentu juga bahwa perjuangan ini membawaserta ketegangan, beda pendapat, beda kepentingan sehingga terbukalah peluang konflik, baik antar pribadi orang maupun antar kelompok.*

### **SUASANA KEPENDUDUKAN**

*Lima puluh tahun lalu penduduk asli di Papua merupakan 90% dari seluruh warga di Papua. Walau bangsa Papua sangat berbeda-beda suku dan bahasanya. Namun terdapat suatu kesamaan yang sangat kuat dalam asal-usulnya dan juga terungkap dalam banyak kesamaan dalam latar belakang budaya (rumpun Melanesia/Austronesia). Tidak sulit untuk saling mengakui keberadaannya, sambil menerima bahwa seorang Papua dari wilayah Mimika atau Biak memang sangat berbeda dengan seorang Papua yang berasal dari Puncak Jaya atau Lembah Balim. Terdapat suatu kekayaan dalam keanekaragaman itu dimana unsur kesamaan dihayati dengan lebih kuat daripada unsur perbedaan. Sama-sama orang Papua toh ! Apalagi kenyataan ini sangat dihayati bila berhadapan dengan bangsa / suku dari luar Tanah Papua.*

---

dibandingkan sekarang tetapi juga pada saat itu, intrik politik, pertikaian soal tanah, perang suku karena perempuan sudah terjadi.

<sup>4</sup> Suatu pegangan bersama misalnya terumus dalam Piagam Hak-Hak Asasi Manusia (PBB) sebagai ‘adat baru’ untuk zaman ini secara universal.

Nah, dunia sebagaimana digambarkan di atas sudah tidak ada lagi, malahan tidak mustahil bahwa warga asli Papua kini menjadi suatu minoritas di Tanah Papua<sup>5</sup>. Banyak penduduk datang dari luar Tanah Papua dan mulai mencari dasar hidupnya di Papua. Proses demikian berjalan begitu pesat (dan didorong oleh pemerintah pusat), membuat banyak orang protes karena mulai takut kehilangan peluang hidupnya atau karena merasa bahwa perlahan-lahan mereka (warga asli) tidak diakui lagi sebagai 'tuan rumah'. Apalagi muncul perbedaan ungkapan budaya, gaya hidup, gaya religiositas, daya penyesuaian, perbedaan kedudukan, kekuasaan, dsb.

Banyak warga masyarakat tradisional mengalami bahwa apa yang mereka hargai dan lestarikan selama sekian lama tiba-tiba dinilai "tidak laku" lagi, karena tidak modern atau malahan dinilai primitif. Kenyataan semacam itu sangat sulit diterima bahkan cenderung menimbulkan ketegangan dan perasaan marah pada mereka yang dinilai ketinggalan zaman; atau menimbulkan perasaan minder pada pihak yang dinilai tradisional, sedangkan pihak dari luar (yang menilai) merasa diri mantap betul: lebih baik, paling benar, berbobot dan yang lain 'tra laku'. Sikap diskriminatif semacam ini sering muncul dan membuat banyak warga terluka begitu dalam. Tidak mengherankan bahwa warga yang merasa dicap 'bodoh dan miskin' tidak begitu berminat untuk mengambil suatu peran aktif dalam kehidupan kemasyarakatan, atau kehidupan menggereja, karena mereka merasa diri tidak diakui sebagai manusia sejati dan samartabat dengan siapa saja dari luar.

Ternyata kemajemukan kependudukan membawa serta segala macam gejala dimana **perbedaan** menjadi unsur yang lebih ditonjolkan daripada unsur **kesamaan**. Kenyataan demikian merupakan tanah subur bagi lahirnya konflik.

### **SUASANA SOSIAL EKONOMIS**

Sumber konflik tadi (kemajemukan kependudukan) masih dipertajam lagi bila dikaitkan dengan perbedaan kesejahteraan atau taraf ekonomi antar warga. Entah kenapa, namun kenyataan bahwa warga dari luar Papua sering juga menduduki posisi yang lebih menguntungkan secara ekonomis. Coba kita lihat saja di pasar dimana para pedagang asli sering duduk di lantai saja sedangkan kios-kios dimiliki orang dari luar. Perbedaan ini sangat mudah menimbulkan kecemburuan dan benci, sekalipun ada orang dari luar yang sebenarnya ingin bersikap bersahabat dengan warga asli, sambil sendiri memperjuangkan perbaikan nasibnya yang adalah haknya pula. Perbedaan taraf hidup mudah dapat dikaitkan dengan perbedaan lain yang menonjol, yakni: perbedaan etnis, agama, budaya, pandangan politik, bahasa, dsb.

Perbedaan ekonomis sangat peka karena menyangkut suatu kebutuhan yang begitu mendasar, maka sesaat pemenuhan kebutuhan itu terancam atau dipersulit suatu reaksi emosional dapat muncul dengan mudah. Boleh saja kita semua diajak untuk bertoleransi,

---

<sup>5</sup> Menurut sensus 1999, penduduk asli masih merupakan mayoritas di Papua, yakni 58% dibandingkan dengan 42% warga yang berasal dari luar Papua.



untuk saling menghargai, dan bahwa kita semua dapat setuju sekali dengan ajakan itu, namun kenyataan pula bahwa niat baik demikian mudah dilupakan sesaat nafkah kita terancam, atau sesaat kita melihat bahwa satu menjadi begitu kaya sedangkan yang lain terpaksa hidup pas-pasan saja dan tidak dapat makan tiga kali sehari (kenyataan bagi banyak warga di sela-sela dan pinggiran kota).

Kenyataan ini tidak saja menyangkut perbedaan kelompok (asli atau tidak), melainkan juga terasa antar suku (yang dari Pantai Utara dan yang dari Pegunungan Tengah, misalnya), antar famili, dsbgnya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang yang mempunyai kedudukan yang memungkinkan akan mencari 'orang-orangnya' untuk ikut kerja, maka orang/kelompok lain merasa disingkirkan walau mungkin lebih mampu. Perbandingan selalu ada, bukan saja dari segi ada-tidaknya nafkah yang cukup sehari-hari, melainkan juga di tingkat peluang akan pendidikan, perawatan medis, perolehan pekerjaan, dsbnya.

Sumber konflik tersebut masih diperkuat oleh tiga unsur lain yang sangat menonjol dewasa ini: perebutan kedudukan, mental proyek dan kerusakan lingkungan.

#### **[1] Perebutan kedudukan**

Salah satu hal yang cukup memprihatinkan selama tahun-tahun terakhir ini adalah niat banyak orang untuk mencari 'kursi'; peluang untuk itu terbuka lebar dengan adanya pemekaran wilayah di segala tingkat (kecamatan, kabupaten, malahan provinsi). Apalagi menjelang musim pemilu seperti kita alami pada saat ini. Memang tidak buruk juga kalau ada yang mempunyai ambisi dan rasa senang agar dihormati sebagai 'anggota DPR-D' atau sejenisnya, namun yang mengganggu banyak masyarakat kecil ialah bahwa sekali kedudukan diperoleh, kedudukan tersebut kurang diandalkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Akhirnya menimbulkan kekecewaan dan menjadi sumber konflik tersendiri. Apalagi akibatnya yang sangat negatif terhadap berfungsinya segala macam struktur pemerintahan sehingga institusi-institusi kelihatan lumpuh begitu saja, dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin hari makin hilang. Maka, sangat mendesaklah bila para pemimpin (mereka yang berkedudukan tinggi) mengadakan refleksi diri secara jujur dan sepiantasnya bertobat kalau tidak ingin membawa masyarakat di Papua menuju tebing jurang yang sangat dalam.

#### **[2] Mental proyek**

Perkembangan yang digambarkan secara singkat di atas masih diperkuat dengan suatu "kebudayaan" lain, yakni: budaya mental proyek. Sering ada kesan bahwa tidak dapat mengharapkan pelayanan atau kegiatan apa-apa kalau tidak "diproyekkan" dulu. Dalih "tidak ada uang" sering terdengar, maka orang "lipat tangan" saja dan menunggu, tanpa mengandalkan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Mentalitas ini bukan khas di kalangan mereka yang berkuasa saja, namun sudah menjadi suatu "penyakit sosial" di segala lapisan masyarakat. Coba amati saja di sekitar lembaga pemerintahan dimana banyak warga biasa menenteng map berisi proposal dan masuk dari kantor ke kantor. Dalam suasana tersebut banyak masyarakat dididik menjadi pengemis (mengandalkan proposal!), sedangkan mereka

yang berkuasa semakin berminat untuk menjadi pimpinan proyek sambil menikmati hasilnya. Sudah tentu bahwa hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi tumbuhnya 'budaya korupsi' tanpa (tahu) rasa malu lagi, sedangkan banyak warga masyarakat makin kehilangan harga diri serta percaya diri. Dalam suasana demikian, akhirnya kepentingan pribadi lebih dimenangkan daripada kepentingan kita bersama; apalagi dengan penerimaan adanya 'budaya korupsi' ini, kita kehilangan suatu pegangan nilai mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar.

### **[3] Pemeliharaan lingkungan**

Dalam kesadaran masyarakat tradisional lingkungan mengambil tempat yang sangat menentukan. Tanah dinilai sebagai IBU, sebagai sumber hidup, dan jaminan untuk masa depan. Kesadaran ini begitu jelas ditunjukkan di masa yang lampau dimana orang dapat hidup dalam suatu keharmonisan dengan semesta alam, yang dewasa ini makin ditekan sampai hampir hilang. Daripada dihayati sebagai 'lingkungan hidup' yang vital dan yang perlu dilestarikan demi kehidupan anak cucu, dewasa ini segala kekayaan alam mulai didekati sebagai sumber keuntungan (unsur ekonomis melulu), yang dimanfaatkan tanpa batas. Cerita banyak mengenai hilangnya sumber nafkah bagi masyarakat kampung, karena kekayaan alam sekitarnya sudah diambil oleh mereka yang "dapat izin dari Jakarta" untuk mengurasnya secara komersial. Di kota-kota sudah banyak keluhan mengenai kekurangan air minum karena hutan yang menjadi jaminan untuk kelancaran persediaan air sudah habis ditebang. Dalam salah satu laporan<sup>6</sup> baru-baru ini dicatat bahwa hutan di Papua mengalami kerusakan yang parah. Laporan ini menyatakan bahwa setiap bulan Papua kehilangan 600.000 kubik meter kayu karena penebangan yang tidak sah (berarti 7.2 juta kubik meter per tahun). Mengingat setiap kubik meter kayu bernilai Rp. 850.000, maka Papua mengalami kerugian Rp. 510.000.000.000 setiap tahun karena perdagangan kayu secara illegal. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun oleh masyarakat di wilayah utara Papua, dan penangkapan ikan oleh warga Indonesia maupun Asing dengan menggunakan 'pukat harimau' adalah suatu contoh kerusakan lainnya. Ditambah lagi dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan seperti Freeport. Ternyata tidak ada yang menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Dengan sedih dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup kita makin kurang aman karena prinsip keuntungan ekonomis diutamakan dari segala nilai lainnya (termasuk diatas keselamatan jiwa – bdk. apa yang terjadi di wilayah pengoperasian Freeport bulan Oktober 2003). Apalagi keuntungan untuk siapa? Tidak mengherankan bila banyak warga mulai pesimis atau makin tergoda untuk mengikuti trend-trend saja dan bergabung dalam suatu perebutan keuntungan dari kekayaan alam yang merugikan kehidupan kita bersama.

## **SUASANA SOSIAL POLITIK**

Pastilah daftar sumber konflik di Papua tidak lengkap kalau tidak ditarik perhatian pada suasana sosial politik yang berkembang selama ini. Sering dikatakan supaya 'gereja jangan

---

<sup>6</sup> Laporan oleh Forest Watch Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2003.

berpolitik', dan hal itu dapat dimengerti karena arena politik memang rumit dan penuh kepentingan maka tidak dapat ditangani oleh sembarang orang atau lembaga; apalagi dalam arena politik kita sering berurusan dengan kekuasaan (memerintah), sedangkan gereja lebih diharapkan menjadi pelayan melulu tanpa memihak pada kepentingan partai atau pihak tertentu. Namun demikian gereja tidak luput dari perhatian pastoral menyangkut nasib umat dan masyarakat. Seperti Santo Fransiskus dari Asisi berdoa: 'Jadikanlah daku pembawa damai dimana ada orang berperang; jadikanlah daku pembawa cinta dimana orang saling membenci, jadikanlah daku pembawa hiburan dimana orang ditindas', dst. Gereja perlu berperan dalam suasana sosial politik dimana umat terpecah-pecah antara yang pro-otonomi dan pro-merdeka (malahan didalam keluarga) atau antara pro-pemekaran dan anti-pemekaran; dimana orang yang tak berdosa masih dapat dituduh, disiksa sampai dibunuh tanpa melalui suatu proses pengadilan yang wajar seperti baru ini masih terjadi di sekitar Wamena seusai peristiwa pembongkaran gudang senjata (bulan April 2003); dimana suara masyarakat kecil mudah dibungkam oleh yang main kuasa. Dalam hal demikian gereja tidak berperan karena ingin melayani salah satu kepentingan partai politik atau kelompok tertentu, melainkan untuk turut menjaga supaya sejumlah nilai dasar kehidupan kita bersama tetap diakui, dihargai, dan ditegakkan. Memang suasana sosial politik di Papua menuntut peranan yang nyata dari lembaga-lembaga keagamaan, selama hak-hak dasar orang masih tidak diakui dan tiadanya penegakan hukum. Kita semua tentu masih ingat pada segala macam indikasi pelanggaran HAM seperti dalam kasus Biak (1998), kasus Abepura (2000), kasus Wamena (2000), kasus Merauke (2000), kasus pembunuhan Theys (2001), kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003), kasus Timika (2003), dsbnya. Siapa yang dapat merasa aman dalam suasana politik semacam itu? Bagaimana mungkin suasana demikian tidak menjadi tanah subur untuk berkonflik, baik antar saudara maupun antar masyarakat dengan pihak yang berkuasa?

Suasana sosial politik di Papua sering dinilai rawan. Memang benar juga karena selama puluhan tahun masyarakat terpaksa diam, walaupun menderita secara tidak wajar. Apalagi sejarah masyarakat Papua penuh tandatanya menyangkut penghargaan dan pengakuan akan jati diri orang Papua serta hak dasarnya untuk turut menentukan nasibnya. Banyak orang dapat bercerita mengenai berbagai macam peristiwa tragis: "bapa dibunuh di kali, ibu dan adik perempuan diperkosa, kampung-kampung dibumihanguskan, hutan sagu dihabiskan dan diganti dengan rumah-rumah transmigrasi, perusahaan masuk tanpa bicara", dsb. Ingatan penderitaan (memoria passionis) itu begitu hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi ingatan kolektif. Wajar bahwa akhirnya masyarakat diberikan keleluasaan untuk bicara dan mengemukakan aspirasinya, mimpinya. Wajar pula bahwa tidak semua sependapat sehingga munculah ketegangan dan konflik. Namun entah bagaimana isi konfliknya, selalu perlu dipertanyakan mengapa orang bereaksi demikian? Apa yang terjadi di masa lampau yang membuat orang protes? Kiranya tidak membantu kalau setiap protes diremehkan dan dicap seakan-akan hanyalah merupakan suatu ungkapan separatistis belaka, apalagi kalau protes yang damai dijawab dengan kekerasan saja. Penggunaan kekerasan hanya memperparah konflik yang sudah ada. Tindakan demikian tetap tidak mengakui hak dasar orang atas kebebasan berpendapat.



## BAB II

### INTI KONFLIK DAN SENI PENANGANANNYA

#### Inti konflik

Inti dari setiap konflik adalah **perbedaan kepentingan**. Yang satu mau mencari keuntungan sebesar mungkin tanpa memperhitungkan hak orang lain; yang lain mau supaya gaji yang wajar dapat diberikan agar dapat hidup dengan layak; yang satu mau merdeka, yang lain mau otonomi khusus; seorang bapak keluarga mau memakai uangnya untuk membeli sebuah pesawat televisi, sedangkan ibu mau memakainya untuk pendidikan anaknya; seorang anak memilih jodohnya, sedangkan orang tua mengharapkan seorang teman hidup lain bagi anaknya; dsb. Pastilah setiap perjuangan dilatarbelakangi dengan alasan tersendiri, kepentingan tertentu. Hanya kepentingan bagi yang satu tidak selalu serasi dengan kepentingan orang lain, maka timbul ketegangan, timbul suasana konflik.

Perbedaan kepentingan ini bisa menjadi suatu gangguan luarbiasa kalau **tidak ada suatu dasar kebersamaan** yang membantu untuk mengatasi perbedaan itu. Seandainya bapak keluarga tadi terbuka untuk merundingkan kepentingan keluarganya bersama isterinya karena keduanya mau bahwa keluarga itu berkembang dan maju, maka secara bersama-sama mereka menemukan suatu jalan keluar, sambil menentukan prioritas pemakaian uang yang ada. Menjadi lain kalau seorang bapak berpendapat bahwa dia yang menentukan segalanya, karena dia laki-laki, dia adalah kepala keluarga, dan perempuan mesti mengikuti apa saja yang diinginkannya. Sama halnya dalam soal jodoh. Contoh lain, kalau seorang pejabat mempunyai visi yang sama dengan masyarakat mengenai pola pelayanan yang dibutuhkan, pastilah suatu kebijakan yang tepat akan ditemukan. Namun menjadi lain kalau 'nilai yang dianut sudah sangat berlainan', maka tidak ada lagi dasar kebersamaan untuk memecahkan persoalan atau konflik. Kalau seorang pejabat hanya ingin menggunakan kedudukannya demi keuntungannya sendiri dan menilai itu haknya, sudah tentu masyarakat akan menjadi korban. Kalau memang tidak berpegang pada nilai yang sama (atau nilai hanya diakui dengan mulut saja) kemungkinan besar konflik akan 'dimenangkan' oleh mereka yang paling kuat atau yang paling berkuasa tanpa menghiraukan akibatnya bagi orang lain.

Maka, tiga pertanyaan sederhana membantu kita untuk memahami inti dari suatu konflik dan dapat membantu menemukan jalan untuk mengatasinya:

1. dimanakah letak perbedaan kepentingan?
2. adakah suatu kesamaan nilai, suatu kesepahaman mengenai prioritas atau wajarnya kepentingan yang diperjuangkan?
3. apakah kekuatan kesamaan nilai masih mampu mengalahkan perbedaan kepentingan, kedudukan, kekuasaan, kebiasaan yang melatarbelakangi konflik? Atau pihak 'bersenjata' yang paling kuat akan terus dimenangkan?

### **Mengatasi konflik, suatu seni, suatu gaya hidup**

Memang menangani suatu suasana konflik tidak mudah, sehingga dituntut suatu seni tersendiri, suatu budaya tersendiri sedemikian rupa sehingga suatu konflik dapat diatasi dengan baik tanpa menelan korban atau memakai kekerasan. Dalam kebudayaan feodal segala konflik diatasi dengan memakai kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang yang menentukan segalanya dan keistimewaan mereka tidak boleh diganggu-gugat. Dalam suatu dunia yang demokratis perubahan termasuk mengatasi konflik, menuntut suatu keterbukaan dari semua pihak yang berkepentingan untuk mencari jalan keluar tanpa main kuasa. Seni hidup demikian serta suatu adat baru perlu dikembangkan kalau kita mau hidup dalam damai dewasa ini.

Empat unsur yang berperan besar dalam seni mengatasi konflik:

1. memahami inti konflik, yakni dimana letaknya sumber konflik atau kepentingan mana yang diperjuangkan dan oleh siapa); merupakan unsur **pengetahuan (kebenaran)**.
2. menghayati nilai-nilai hidup bersama; mengakui pegangan-pegangan nilai yang menjamin kehidupan bersama seperti hukum serta penegakannya, hak-hak dasar, pengakuan martabat setiap orang, dsbnya; sebagai unsur **kebersamaan nilai (struktural)**.
3. kesadaran dan kemauan untuk tunduk pada nilai-nilai yang diakui bersama, sikap pertobatan kalau perlu; sebagai unsur **sikap (pribadi maupun kelompok)**.
4. melibatkan segala pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian suatu konflik sambil memberdayakan masing-masing pihak supaya mampu mengambil peranan seperlunya; unsur **partisipasi (tanggungjawab bersama)**.

Sambil memperhatikan keempat unsur tadi, disiapkan juga jalan menuju suatu rekonsiliasi, menuju suatu dunia yang lebih adil dan penuh damai. Tujuan luhur itu tidak gampang tercapai dan akan menuntut suatu sikap (pribadi maupun kolektif) yang jujur, ikhlas hati dan kesediaan untuk berupaya tanpa mengenal lelah.

Membangun kebudayaan atau seni demikian adalah suatu harapan dari pimpinan Gereja dengan mengajak umatnya untuk berefleksi atas dua unsur kunci yang wujudnya dapat membantu mengatasi suatu konflik, yakni: **perdamaian dan rekonsiliasi**.

“Menangani konflik” dapat juga disoroti dari segi teknis saja. Ada segala macam teknik untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ada teknik atau petunjuk bagaimana mesti mengembangkan sikap mendengar, bagaimana membatasi ledakan emosi, memberikan peluang secara merata kepada setiap pihak untuk mengungkapkan diri, bagaimana membuat suatu uraian yang objektif, dst. Dalam kerangka refleksi ini kami tidak terlalu memberikan perhatian pada segi teknis tersebut. Titik perhatian kami ada pada aspek penghayatan kesamaan nilai, karena kami yakin bahwa kesamaan itu akhirnya memberikan dasar kuat untuk mengatasi suatu konflik, dan menuju pemulihan kembali hubungan antar orang yang berkonflik. Penghayatan kesamaan nilai terungkap dalam suatu sikap hidup; nilai-

*nilai yang membudaya dalam diri kita akan menentukan sikap dan seni hidup kita. Maka dalam kerangka refleksi ini kami coba menggambarkan bagaimana membangun “budaya damai” dan “budaya rekonsiliasi” sebagai dasar mengatasi suasana konflik.*

## BAB III

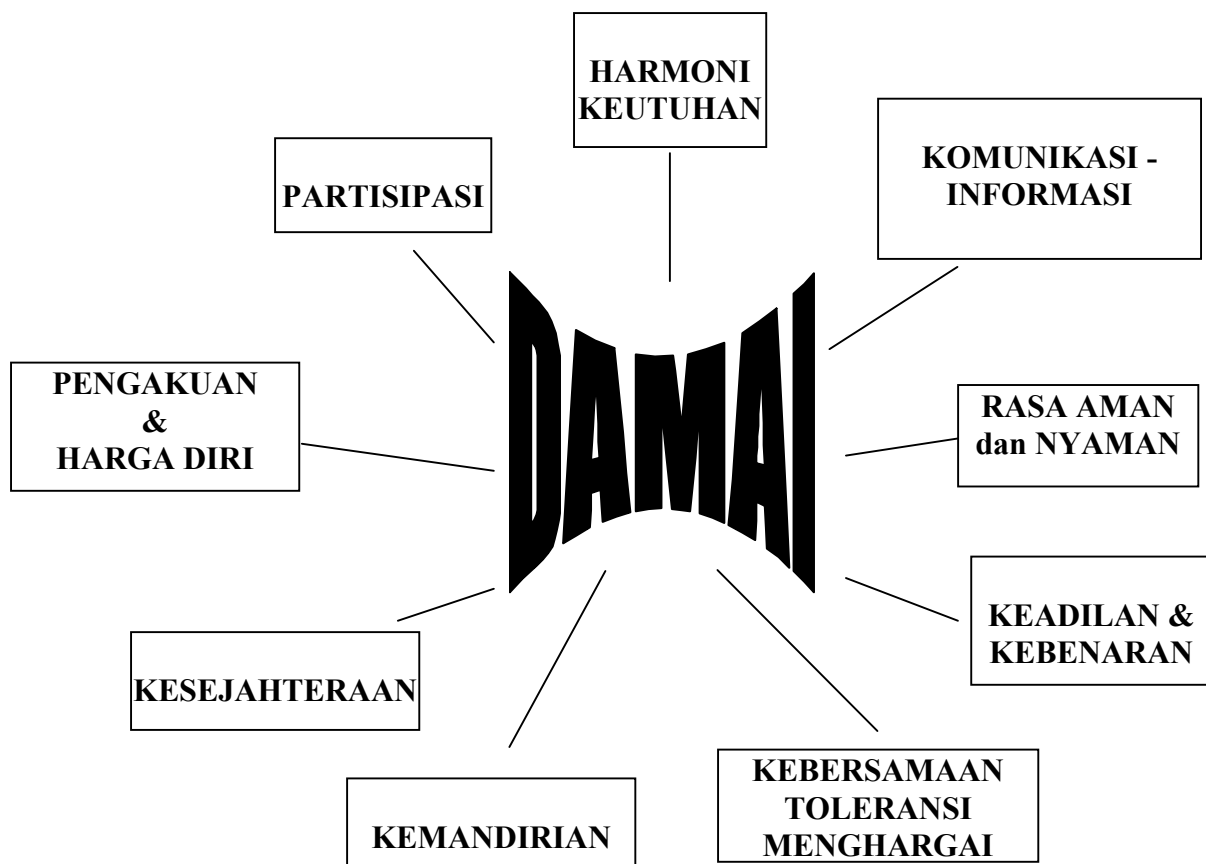
### MEMBANGUN BUDAYA DAMAI

*Mengingat sejumlah sumber konflik sebagaimana diuraikan di atas, makin hari makin banyak orang, warga maupun lembaga yang yakin bahwa konflik-konflik potensial yang ada hanya dapat dicegah kalau kita sepakat untuk hidup bersama dalam suatu keterbukaan satu sama yang lain, serta menciptakan ruang hidup dimana setiap warga dapat berkembang sewajarnya. Suatu “kebudayaan damai” perlu dibangun bersama sebagai pilihan lain dari penyelesaian masalah daripada penggunaan kekuasaan dan kekerasan.*

*‘Membangun budaya damai’, bukan soal bicara saja, namun menuntut suatu perwujudan konkret. Malahan sudah tentu bahwa karya ‘membangun budaya damai’ menuntut banyak keringat dan suatu kemauan bersama yang sejati untuk menjawab masalah-masalah yang sedang kita hadapi.*

#### Sembilan unsur

*Sebagai kerangka pengembangan konsep “Membangun Budaya Damai”, kita dapat bertitik tolak dari sejumlah unsur yang menentukan ada-tidaknya “rasa damai”. Dibawah ini kami mencatat sejumlah unsur sbb:*





### **Keterangan singkat:**

*Kalau kita berpikir mengenai "DAMAI", sejumlah hal yang kita inginkan supaya terlaksana dan dapat dihayati bersama adalah: kita ingin supaya hidup kita aman, supaya kita dihargai dalam kepribadian kita masing-masing walau berbeda, kita ingin supaya ada makanan / kesejahteraan; kita ingin supaya diberlakukan adil dan sesuai kebenaran; kita mau diakui sebagai pribadi orang, sebagai suku, kita tidak mau hidup dalam ketergantungan saja dan kita mau atur diri, kita mau supaya suara kita terdengar dan diberikan tempat; dan akhirnya kita mau supaya hidup kita bersama segala isi alam semesta menjadi harmonis, bernafas kesatuan dan keutuhan.*

*Rangkaian kata-kata tadi sangat bernilai, dan dapat menjadi pegangan dalam merumuskan tindakan-tindakan atau kebijakan kita dalam usaha "Membangun Budaya Damai".*

## **PARTISIPASI**

*Sebagai warga masyarakat kita berhak berperan membangun dunia kita; diharapkan supaya semua diberikan tempat untuk mengambil bagian aktif dalam "mengatur rumah besar" kita. Partisipasi ini dapat diperjuangkan melalui misalkan Lembaga Adat, MRP, melalui pengungkapan pendapat, melalui pengawasan atas kebijakan pemerintah, dst. Partisipasi berarti terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain. Wujud partisipasi yang lain yang dibutuhkan dewasa ini, mengungkapkan pandangan dan pikiran-pikiran melalui demo, tulisan, termasuk membuat laporan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi – bersama bukti-bukti yang jelas – untuk menarik perhatian pihak-pihak yang berkepentingan supaya masalah-masalah dapat diselesaikan demi kepentingan suasana hidup yang lebih baik.*

*Berbicara mengenai perdamaian biasanya membuat kita cepat sekali berpikir mengenai suatu gangguan bagi kehidupan yang membuat kita tidak tenang dan bebas. Secara spontan pikiran kita lalu tertuju pada peran aparat pemerintah atau keamanan saja. Sedangkan lembaga lain, apalagi pribadi-pribadi, tidak mempunyai urusan dengan persoalan perdamaian. Sehingga kebanyakan orang lalu acuh tak acuh saja dan tinggal diam melulu sebagai penonton. Memang sikap acuh tak acuh / pasif bisa berasal dari diri sendiri karena kurangnya kesadaran bahwa dia sebagai pribadi mempunyai hak juga untuk menentukan perdamaian di lingkungannya. Tetapi sikap acuh bisa juga timbul karena sengaja dilakukan oleh orang lain. Misalnya dalam keluarga; seorang bapak menentukan segala keputusan tanpa mau mendengarkan pendapat isterinya atau anak-anaknya, sehingga akhirnya isteri dan anak-anak pasrah saja. Demikian halnya dengan orang tua tidak mau ambil pusing mengenai pendidikan anak-anaknya yang berakibat guru juga tidak mau ambil pusing lagi.*

*Sebagai warga umat dan masyarakat kita berhak dan berkewajiban turut menentukan dunia tempat kita hidup. Partisipasi dapat kita salurkan melalui kedudukan, peran dan keahlian kita*

*masing–masing; sebagai seseorang yang hidup berkeluarga, pribadi, sebagai pengusaha, sebagai pelajar / mahasiswa, petani, aparat keamanan, dan lain–lain.*

*Kadangkala kita bertanya, “apa yang bisa saya sumbangkan bagi kehidupan bersama, agar tidak terjadi konflik?” Mudah bagi orang yang sudah bekerja dapat menyumbang melalui keahliannya dalam bekerja. Namun, sumbangan kita yang sering terlupakan adalah sikap dan tindakan, cara kita menyapa teman, cara kita menyapa orang se-suku, cara kita menyapa saudara–saudara kita yang berbeda agama, dimana dan dalam situasi apapun apa. Dalam kehidupan masyarakat kita, masih sering terdengar kata yang mencap sesama seperti: “kamu pendatang itu pencuri”; atau “orang Papua itu pemalas dan bodoh”. Sikap dan kata-kata seperti ini membuat orang kurang berminat untuk terlibat dan mengambil peran dalam hidup bermasyarakat, karena merasa malu, minder, marah, atau bahkan acuh tak acuh terhadap sesama dan apa saja yang terjadi di lingkungannya.*

*Sikap dan cara kita berhadapan dengan orang lain secara tidak langsung menempatkan orang lain sebagai sesama, se-martabat dengan kita. Sikap seperti ini sebenarnya membuka peluang bagi siapa saja untuk berani tampil mengambil bagian dan menyumbangkan kemampuannya, entah sebagai pelindung bila berhadapan dengan tindak kejahatan, atau sebagai tetangga yang penuh pengertian, ataupun sebagai teman yang siap membantu bila dibutuhkan, dll.*

unsur kegiatan

Upaya peningkatan kekuatan intern lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR-P, LSM, LMA, Dewan Kampong. Pemantauan diskusi DPR-P mengenai RAPBD tahunan. Partisipasi dalam pembuatan peraturan pemerintah. Memperjuangkan pembentukan MRP. Mengadakan dialog lintas budaya. Pembentukan kelompok pemantau politik setempat. Pengungkapan pendapat secara tertulis, dalam pertemuan formal dan tidak formal. Membaca dan mendiskusikan informasi.

## **KEBERSAMAAN DAN TOLERANSI-MENGHARGAI**

*Partisipasi berkaitan erat dengan penghayatan kebersamaan masyarakatnya yang beragam latar belakang suku bangsa, budaya, agama dan jenis kelamin. Dalam kehidupan harian aspek kebersamaan kebanyakan ditentukan oleh ikatan darah, asul-usul daerah, suku, sejarah bersama, tempat tinggal bersama atau berdekatan tempat tinggal, dan / atau rasa senasib-sepenanggungan dalam suka dan duka. Aspek-aspek ini menjadi suatu ikatan yang kuat, namun menjadi berbahaya ketika dhayati sebagai satu-satunya nilai yang paling benar (primordialisme sempit) sebagaimana tersirat dalam ungkapan yang sering kita dengar berikut ini : ” kami Papua, ko Amber ; kami orang gunung, ko dari pantai”, dll.*

*Selain aspek di atas, kebersamaan dalam hidup bermasyarakat juga ditentukan oleh penghayatan akan kesetaraan dan kesamaan nilai yang dijunjung tinggi setiap komunitas manusia seperti nilai kebenaran, perdamaian, keadilan dan sebagainya yang memang merupakan kebutuhan hakiki dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dimana saja.*

*Kebersamaan tidak sama dengan keseragaman atau kesamarataan; melainkan dalam kebersamaan ada 'perbedaan' yang perlu dipandang sebagai kekayaan dan kekuatan. Hal ini menjadi penting mengingat perbedaan kadang menjadi bakal perselisihan yang sangat mengengaskan dan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan, seperti yang terjadi di Kalimantan, Maluku dan Poso.*

*Toleransi tetap membutuhkan sikap kritis yakni mampu menerima tawaran baru, mengakui/menghargai perbedaan – kekhasan orang lain sebagai bagian dirinya yang utuh tanpa meninggalkan tatanan nilai setiap komunitas yang telah dianut secara turun-temurun. Sikap ini membantu kita memahami secara baik perkembangan di Papua dewasa ini yang bernuansa SARA seiring dengan kehadiran berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu seperti Laskar Jihad, Laskar Kristen, Barisan Merah Putih, Satgas Papua, kelompok TBO (Tenaga Bantuan Operasi : warga masyarakat biasa yang direkrut oleh TNI untuk membantu suatu operasi), dan lainnya.*

*Dalam konteks membangun Papua menjadi Tanah Damai, **Sikap Toleransi** (yakni: saling mengakui / menghargai kekhasan masing-masing) dengan membuang jauh-jauh sikap fanatisme berlebihan, merupakan salah satu kunci mutlak yang mesti dipegang agar membantu mencegah terjadinya suatu konflik yang bersumber pada perbedaan atau kemajemukan masyarakat di Papua. Toleransi juga merupakan landasan bagi terciptanya rekonsiliasi dan sikap saling menerima yang permanen diantara masyarakat. Sikap hidup ini perlu dijadikan sebagai bagian dari pendidikan dasar dalam keluarga sendiri (juga di sekolah dan di lingkungan kerja) dan ditanamkan dalam kalangan terdekat lainnya. Juga dapat diupayakan dengan membangun komunikasi bersama pihak lain seperti : dialog antar umat beragama, dialog antar etnis, dialog antar berbagai unsur dalam masyarakat: TNI, Polri, LSM, LMA, pemerintah dan kelompok kemasyarakatan lainnya sehingga terbangun komitmen bersama untuk mengupayakan suasana hidup bermasyarakat yang damai di Papua.*

**unsur kegiatan**

Menghindari bahasa diskriminatif. Menghilangkan sikap primordial. Komunikasi / diskusi antar kelompok etnis. Memberikan tempat / peluang kepada kaum yang lemah. Membangun pola pikir yang terbuka dan kritis. Memahami kepentingan kelompok-kelompok. Dialog atas peristiwa-peristiwa dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat. Pendidikan demokrasi, mulai dalam keluarga sendiri, di tempat kerja dsb.

## **KOMUNIKASI / INFORMASI**

*Partisipasi mengandaikan bahwa kita memiliki informasi, memiliki akses pada sumber-sumber informasi, dan bebas untuk merumuskan apa saja yang ingin dikomunikasikan. Komunikasi - informasi adalah salah satu kunci dalam segala seluk-beluk partisipasi dalam dunia dewasa ini. Informasi yang salah dapat menyesatkan orang, sebaliknya informasi yang benar membantu seseorang untuk menempatkan diri serta sesamanya secara benar. Banyak*

*informasi yang menyesatkan dalam kehidupan bermasyarakat di Papua dewasa ini. Isu tentang manusia bertopeng yang dikaitkannya begitu saja dengan laskar jihad; isu tentang kedatangan Sekjen PBB Kofi Anan di Wamena dan Manokwari; cap bahwa semua orang Pegunungan Tengah adalah pengacau; anggapan bahwa kekayaan siapa saja adalah sebagai hasil korupsi, dan sebagainya. Informasi yang keliru dan menyesatkan masyarakat seperti ini membuat masyarakat menjadi gelisah, hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Segala upaya sensor atau upaya untuk mengaburkan kebenaran juga merupakan bentuk penyampaian informasi yang menyesatkan banyak orang. Sudah tentu media massa memegang peran kunci dalam hal ini.*

*Betapa pentingnya memperhatikan persyaratan tadi, tercermin dalam kenyataan sebagai berikut: ternyata dinamika yang ada di kota-kota di Papua, berjalan timpang dengan daerah pedalaman, lembah-lembah dan pesisir pantai di Papua. Banyak orang di pedalaman menerima informasi yang tidak lengkap bahkan tidak benar<sup>7</sup>. Akibatnya, mereka tumbuh menjadi komunitas “pemimpi” yang meninggalkan aktifitas harian dan menunggu “hari baru”, yang menurut beberapa tokoh akan datang segera, entah kapan.*

*Dalam rangka membangun Papua menjadi ‘Tanah Damai’, pemberitaan mesti menjaga keseimbangan informasi, dalam arti bertanggung jawab atas kebenaran isi berita yang disampaikan, jangkauan liputan terhadap masyarakat, atau tidak melulu meliput dan menyiarkan berita tentang kegiatan para pejabat misalnya. Tentunya harus memenuhi unsur objektivitas, transparansi, faktual dan analitis, bukan propaganda atau bermaksud memprovokasi masyarakat. Banyak tergantung pula dari orientasi pers, sifat dan tujuan dari media itu sendiri. Jika media hanya berorientasi meraup ‘keuntungan’, berita adalah barang yang semata-mata diperdagangkan, bukan dimaksudkan memberi pemahaman dan penyadaran kepada publik. Adalah sangat merugikan masyarakat luas jika harian-harian di Papua lebih memilih memuat berita-berita sensasional atau semata-mata mencari ‘rezeki’ dengan menjadi corong dalam mempromosikan program para ‘pejabat’.*

unsur kegiatan

Pengembangan sikap kritis terhadap informasi; jangan begitu percaya cerita-cerita / isu-isu. Pembentukan opini melalui diskusi; pemahaman nilai religius melalui diskusi mengenai pengalaman-pengalaman konkrit. Penampilan yang transparan dan kredibel. Pengadaan perpustakaan yang mudah dijangkau masyarakat. Pengadaan perlombaan mengarang. Wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh penentu kebijakan di Papua. Persediaan bahan penyuluhan yang sederhana menyangkut masalah-masalah yang penting seperti HIV/AIDS, Otsus. Mengadakan tulisan populer mengenai perkembangan-perkembangan aktual.

## **KESEJAHTERAAN**

---

<sup>7</sup> Tidak berarti bahwa orang di kota selalu memperoleh informasi lengkap dan benar; malahan objektivitas media massa yang tersedia di kota sangat dapat diragukan.

*Semua orang menginginkan bisa makan – minum secukupnya, bisa mendapat tempat tinggal yang layak, kesehatannya terjamin; bila sakit ada jaminan kesehatan yang memadai; ingin agar pendidikannya dapat berjalan sesuai dengan cita-citanya, dll. Kita semua mau agar segala kebutuhan bisa terpenuhi dan ini merupakan hak semua orang. Masyarakat Suku Mee membahasakannya dalam kata “Mobu” yang secara harafiah berarti “kenyang atau puas”. Artinya merasa berkecukupan baik secara jasmani maupun rohani, dimana tidak ada warga yang makmur sementara yang lain berteriak kelaparan dan ditimpa kematian karena menderita berbagai penyakit. Begitu pula yang diwarisi dalam pola hidup Suku Dani dimana tugas pemimpin adalah “menjaga kesuburan”; artinya, semua masyarakat memiliki peluang untuk berkembang, memiliki akses pada kekayaan-kekayaan yang dimiliki bersama seperti tanah sebagai kekayaan ekonomis; begitu pula dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Singkatnya, kesejahteraan berarti segala kebutuhan primer setiap orang terpenuhi secara wajar sebagai manusia dan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Tanpa ada pemerataan kebutuhan primer ini sulit untuk dikatakan bahwa ada perdamaian.*

*Situasi faktual kita, ada sementara masyarakat yang memiliki banyak sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kekurangan terus-menerus. Masih banyak umat dan masyarakat yang sehari hanya makan satu kali, tempat tinggalnya hanyalah sebagai menumpang (sewa), air untuk kebutuhan sehari-hari mesti diminta dari tetangga, sering sakit-sakitan, dll. Gambaran kemelaratan masyarakat di Papua sebagaimana menjadi bahan diskusi tahun-tahun terakhir ini; angka kematian ibu begitu tinggi, penyakit mematikan seperti TBC dan HIV / AIDS perkembangannya sangat cepat. Tingkat pendidikan pun sangat memprihatinkan, lebih-lebih di wilayah pinggiran yang senyatanya merupakan kantong-kantong masyarakat kecil yang tersisihkan. Kemiskinan masih merajalela.*

*Pemandangan tersisihkan yang lain misalnya dapat dilihat di pasar-pasar perkotaan. Dimana sejumlah pedagang lokal berjualan di lantai atau tanah sedangkan yang lain mendapat meja dan tempat jualan yang strategis. Jelaslah bahwa hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang mendapat meja dan tempat yang strategis untuk berjualan sehingga pendapatan ekonomis relatif terjamin. Tetapi mengapa bisa terjadi seperti itu, ada kekeliruan dimana ?*

*Jika semuanya berjalan seperti demikian maka yang miskin tentu tetap miskin dan yang kaya terus menjadi semakin kaya. Karena itu tidak perlu terheran-heran jika ada orang miskin yang mendapat kesempatan dan ekonominya mulai lebih baik akan melakukan hal yang sama; sogok dan korupsi untuk mendapat jabatan dan fasilitas, sogok / korupsi untuk mendapatkan meja dan tempat yang strategis di pasar. Semakin menjadi penyakit menular.*

*Pastilah mental penyakit rakus seperti di atas mengakibatkan banyak sesama menjadi korban. Jangan terlalu terkejut ketika ada masyarakat yang berteriak memaki-maki para pengusaha HPH karena membabat habis hutan, atau bila banyak pejabat tidak membuka mulut ketika melihat masyarakatnya menderita dan tersiksa, juga jangan heran ketika banyak orang protes dimana-mana, termasuk terhadap gereja sendiri.*

*Suasana bermasyarakat sebagaimana digambarkan di atas ini sebetulnya mendapat sorotan tajam dalam Alkitab. Bandingkan saja ungkapan para nabi yang tampil berabad-abad yang lalu. “Berpuasa yang Kukehedaki, ialah supaya engkau membuka belunggu-belunggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punyai rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri” (Yes.58,6-8). Yesus sendiri tidak jauh dari memberikan amanat yang sama, dimana perhatian kita terhadap sesama yang lapar, sakit menjadi tolok-ukur dalam penilaian akhir terhadap manusia (Mt.25,31-46).*

*Ternyata nilai ‘pemerataan kesejahteraan’ sangat vital dalam kehidupan masyarakat; kita berhadapan dengan suatu hal dasar yang sangat peka dan yang menentukan mutu hidup kita bersama. Termasuk dalam hal dasariah ini adalah pengakuan terhadap sejumlah hak dasar para warga menyangkut akses pada sumber kekayaan, pada tanahnya, hak atas suatu lingkungan yang bersih; bukan lingkungan alam saja, melainkan juga lingkungan sosial yang tidak dicemari pelacuran, kemabukan, kriminalitas, dsbnya.*

unsur kegiatan

Memperjuangkan akses pada kekayaan yang dimiliki bersama (tanah dll.). Pengadaan pendidikan ketrampilan. Pengawasan atas perusahaan-perusahaan agar berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengadaan pelatihan wira usaha. Pengkajian hak ulayat dan penyuluhan hukum. Pemberdayaan LMA. Negosiasi antara LMA setempat dengan perusahaan di lingkungannya. Pemantauan suasana kerja serta pengindahan hak para pekerja. Promosi dan pemasaran produk lokal. Pengembangan produksi ‘produk akhir’ di tempat persediaan bahan baku: sirop buahan, madu, kopi. Riset dan pengembangan gizi dari makanan lokal. Memperjuangkan akses pada kredit perumahan. Pengendalian harga obat. Promosi jenis obat generik. Peraturan pembatasan minuman keras dan tempat perjudian. Mendukung kampanye stop HIV/AIDS. Pengendalian pemasaran seks. Penghentian promosi cara pengobatan ajaib.

## **RASA AMAN DAN NYAMAN**

*Tidak bisa dipungkiri bahwa ‘rasa aman’ merupakan kebutuhan mendasar semua manusia. Sifatnya yang demikian mendorong semua unsur dalam masyarakat untuk memperjuangkannya dengan cara dan perannya masing-masing. Maka menciptakan rasa aman merupakan tugas semua unsur masyarakat, namun tidak dalam arti semua masyarakat sipil wajib menjalankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) setiap malam, misalnya, atau dapat direkrut sebagai TBO (tenaga bantuan operasi), atau direkrut sebagai anggota Barisan Merah Putih. Semua unsur menyumbang pada keamanan dapat diwujudkan dengan menjalankan tugas semestinya (tanpa korupsi, dengan berdisiplin, dengan menghargai orang lain, dst.).*

*Secara formal hukum pengamanan masyarakat sipil menjadi tanggungjawab lembaga Kepolisian; sedangkan tentara diberi mandat untuk menjaga pertahanan negara terhadap*

serangan dari luar – atau dari pihak yang mengancam keselamatan negara. Namun ditengah-tengah masyarakat tidak terlalu jelas pembagian tugas antara dua lembaga ini, sehingga masyarakat sangat bingung. Dalam sejumlah kasus terjadi perebutan peran dan sering dengan memakai kekerasan dengan akibat warga masyarakatlah yang menjadi korban di tengah perseteruan tersebut. Lebih kabur lagi kalau pelaksanaan tugasnya tercampur dengan keterlibatannya dalam kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi urusannya, seperti, usaha-usaha ekonomis. Sekali Polisi atau TNI terlibat dalam usaha-usaha ekonomis, sudah tentu menjadi suatu kepentingan yang dijaganya dengan mengandalkan kekuatan yang ada padanya. Jelaslah campuran kepentingan ini sangat mengganggu kemurnian pelaksanaan tugas. Sangat disayangkan bahwa pihak keamanan sendiri menciptakan “ketidakamanan” dalam masyarakat seperti terungkap dalam beberapa peristiwa di Papua pada tahun-tahun terakhir. Karena itu perlu adanya penjernihan peran antara aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian, militer – termasuk yang berstatus non-organik - dan kelompok masyarakat sipil agar tidak terjadi “bentrokan” dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Unsur ‘rasa aman’ sangat menentukan dinamika pada aspek-aspek hidup yang lain. Rasa aman memungkinkan masyarakat dapat berpikir dengan tenang, berkreasi dan berupaya membangun masyarakat dan Tanah Papua menuju masa depan yang lebih baik. Sudah sekian tahun hak masyarakat di Papua untuk merasa aman dan nyaman kurang diperhatikan. Yang sering dialami adalah justru tindak kekerasan baik secara fisik, psikis/mental bahkan kadang berupa kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Kenyataan ini sangat terlihat jelas di daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat perkotaan/pemerintahan yang minim sarana komunikasi dan pengawasan.

Untuk menjadikan Tanah Papua benar-benar dapat menjadi Papua Tanah Damai, dimana masyarakat dapat menikmati kehidupannya dengan tenteram, merasa aman sebagai haknya yang mendasar, maka aspek penengakan hukum harus mendapat perhatian secara khusus. Adalah tugas utama kepolisian untuk menegakkan hukum sehingga lembaga ini perlu didukung agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Sangat disayangkan bahwa berbagai kasus kemanusiaan yang terjadi di Papua dan mengganggu masyarakat secara luas tidak diproses sampai tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini sangat bergantung pada kemauan politik bersama untuk menciptakan Papua sebagai Tanah Damai. Selama masih ada pihak lain yang tidak menghendaki adanya perdamaian di Tanah Papua, keinginan masyarakat untuk hidup aman-pun tidak akan tercapai.

unsur kegiatan

Menjernihkan peranan aparat keamanan. Penegakan hukum dan penghargaan atas hak-hak dasar di lingkungan sendiri, termasuk dalam rumah tangga. Peningkatan penghayatan sikap damai. Mencegah pembentukan atau keanggotaan segala kelompok radikal (entah pro entah kontra). Pengadaan pelaporan faktual mengenai segala peristiwa pelanggaran hak-hak dasar manusia. Pengungkapan kenyataan melalui tulisan. Merangkul para unsur OPM/TPN supaya memilih jalan damai dalam perjuangannya. Pemantauan pembentukan kelompok para-militer atau milisi. Menghilangkan ‘gaya militer’ pada acara-acara di tempat pendidikan anak / pemuda / siswa / mahasiswa.

## **KEADILAN dan KEBENARAN**

*Keadilan dan kebenaran merupakan nilai sentral yang selalu menyentuh berbagai aspek dalam praktek hidup kita. Apakah sebenarnya keadilan dan kebenaran bagi kita masing-masing? Pastilah banyak kisah dapat kita angkat, baik pengalaman kita sendiri maupun cerita yang kita dengar dari orang lain.*

*Berbagai langkah strategis-praktis dapat diefektifkan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, seperti advokasi, penelitian, pengungkapan fakta, mediasi, negosiasi, untuk mengangkat dan mencari jalan pemecahan atas masalah-masalah yang dianggap mendasar bagi kehidupan bermasyarakat di Papua. Langkah-langkah demikian bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum secara nyata dan berlaku sama untuk semua (menghilangkan kekebalan hukum bagi kelompok tertentu). Langkah-langkah demikian bertujuan pula untuk menyatakan secara transparan apa yang benar dan apa yang salah.*

*Satu hal khusus yang membayangi kehidupan bermasyarakat di Papua adalah soal 'pelurusan sejarah'. Pelurusan sejarah Tanah Papua adalah salah satu tuntutan masyarakat yang dapat dicatat dalam kerangka perwujudnya keadilan dan kebenaran. Sejarah Papua perlu didialogkan dengan pihak-pihak terkait guna merumuskan kembali kebenarannya. Paling tidak dalam dialog segala sesuatu yang dinilai sebagai ketidakbenaran atau sebagai kebenaran dijelaskan sehingga dimengerti dan diterima bersama. Penjelasan yang dikemukakan akan membantu mengungkapkan persoalan dasar di Papua secara benar, akan memberikan kepada masyarakat kepuasan, rasa keadilan dan kebenaran dan bisa diharapkan akan turut membentuk suatu sikap saling mengakui kesalahan, saling memaafkan, saling menghargai dan saling percaya. Ini langkah awal menuju rekonsiliasi sesungguhnya dimana semua pihak dibantu untuk meresapi kenyataan sejarah yang terjadi. Terwujudnya dialog guna mencapai suatu rasa damai adalah sangat penting bagi semua warga di Papua, sehingga dapat merasa nyaman dan betah di Papua ini.*

*Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN merupakan salah satu langkah juga yang cukup menentukan. Pribadi bermoral dan berintegritas merupakan tipe kepribadian yang dibutuhkan guna menata kehidupan kita bersama, mampu mengakui hak orang lain sesuai jasa dan kebutuhannya sebagai manusia. "Sikap rakus" merugikan dalam kehidupan bersama sebab selalu berkecenderungan untuk menghargai orang lain sejauh turut menguntungkan diri atau kelompoknya.*

*Tidak mudah untuk keluar dari apa yang telah tertanam cukup dalam di dalam kehidupan kita. Pastilah terasa berat, menyakitkan untuk meninggalkan semuanya. Banyak hal dalam*



*sistem dan kebiasaan kita mesti dibongkar, tentunya dengan mengambil peran sesuai dengan bidang kita. Sebagai penegak hukum, sebagai orang yang dipercayakan mengatur masyarakat, sebagai orang yang berurusan dengan uang, penentu kebijakan, sebagai seorang tetangga yang baik, sebagai seorang beriman yang mengakui harkat orang lain, dsb.*

unsur kegiatan

Perjuangan melalui advokasi, penelitian, pengungkapan fakta, mediasi, negosiasi, rekonsiliasi. Tulisan-tulisan sejarah supaya dipahami bersama. Pemberantasan KKN, mental proyek. Pewartaan keagamaan yang berakar dalam budaya setempat. Ungkapan keprihatinan terhadap yang lemah dan miskin. Pengakuan hak ulayat. Penyusunan perda/perdasi/perdasus secara benar. Riset/analisa konflik berbasis gender. Pemberdayaan keorganisasian perempuan. Pendirian Komisi HAM Papua dan Pengadilan HAM ad hoc Papua. Memantau penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Memperjuangkan pengadaan dialog di tingkat provinsi Papua maupun di tingkat Republik Indonesia. Membantu segala organisasi socio-politik untuk mengembangkan suatu program yang terarah. Menciptakan iklim dialog. Meperjuangkan perwujudan Papua Tanah Damai.

## **KEMANDIRIAN**

*Kita semua mau agar merasa diri sebagai “tuan rumah” dimana dapat mengatur diri tanpa mau menggantungkan diri pada orang lain. Itu berarti masyarakat di Tanah Papua harus berinisiatif mengambil peran dengan memanfaatkan segala sumberdaya (alam & manusia) yang ada secara optimal.*

*Dinilai dalam kerangka “nilai kemandirian”, fenomena “mental proyek” sesungguhnya bertolak belakang dengan aspek kemandirian ini. “Mental proyek” menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan orang lain. Masyarakat tidak percaya diri bahwa mereka mempunyai potensi besar untuk menjamin hidup bahkan untuk sendiri menentukan masa depannya. Selama “mental proyek” masih terus menguasai sikap hidup masyarakat, dan selama pemerintah juga memupuk sikap ini melalui proyek bantuan-bantuan seperti proyek Jaring Pengaman Sosial (JPS), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), bantuan Beras Operasi Pasar Khusus (Beras Opsus), Crash Program, dll, maka masyarakat akan tetap menunggu pihak lain sebagai ‘penyambung hidupnya’. Sebenarnya “mental proyek” secara tidak langsung sedang mematikan kreatifitas, daya cipta masyarakat dan mengarahkannya untuk menggantungkan diri saja sehingga status masyarakat hanyalah sebagai obyek belaka, alias “tuan rumah yang semu”.*

*Dimana-mana masyarakat bertingkah laku sebagai orang-orang miskin dengan meminta dari pintu kantor yang satu ke pintu kantor yang lain. Mental ini diperkuat karena “gaya sosialisasi Otsus” yang selalu dipromosi oleh Pemerintah dengan hanya menekankan segi “kita ada uang banyak”. Suasana ini menjadi sangat fatal lagi ketika orang atau instansi percaya bahwa masyarakat amat diragukan.*

*Dalam rangka membangun Tanah Papua ke depan, masyarakat sendiri perlu mulai berinisiatif menciptakan peluang dengan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya*

seperti dalam bidang seni; ekonomi-kerakyatan berupa perikanan, peternakan (babi, sapi, kambing, dll), kebun pinang, umbi-umbian, pisang, sayur-mayur; dan bidang usaha lainnya, membantu mengurangi bahkan akan menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain. Usaha demikian perlu ditunjang dengan pelbagai bentuk pendidikan formal (termasuk muatan lokal) dan non-formal.

“Mengatur diri sendiri” tidak berarti menutup diri dan tidak mau mendengar aspirasi atau perubahan-perubahan positif dari luar. Namun perlu kesiapan untuk berkembang secara sehat bersama unsur masyarakat yang lain.

unsur kegiatan

Sendiri mengambil inisiatif dan berupaya sekemampuan dengan memanfaatkan apa adanya. Pembebasan dari mentalitas proyek di segala tingkat. Meningkatkan disiplin. Berani bersaing secara sehat dengan orang lain. Riset tentang kurikulum pendidikan yang berbasis kebutuhan dan kondisi riil setempat. Pelatihan analisis sosial. Pendidikan/penyadaran mengenai kemampuan sekaligus mendorong ketrampilan seseorang.

## **HARGA DIRI DAN PENGAKUAN**

Berkaitan dengan unsur ini sudah jelas bahwa harga diri banyak orang di Papua ditekan sampai hampir hilang. Banyak orang bahkan mulai merasa minder karena dianggap sebagai orang primitif, tidak tahu apa-apa. Sikap demikian merupakan hasil dari suatu suasana diskriminatif selama puluhan tahun lamanya; misalnya: pesta adat dan kesenian kurang diberikan tempat, bahkan dalam suasana tertentu pelaksanaannya dilarang.

Tidak ada jalan lain, kecuali kelompok warga demikian mesti bangkit menunjukkan kebolehannya. Segala potensi diri dalam berbagai segi kehidupan perlu mendapat perhatian serius, dicintai oleh putra-putri Papua sendiri, juga dihormati oleh semua orang yang menginjakkan kakinya di Tanah Papua. Tentunya semua orang tetap diharapkan bersikap terbuka terhadap kekhasan yang dimiliki orang lain yang juga hidup bersama di tanah ini. Sikap saling mengakui eksistensi setiap pribadi atau kelompok suku-bangsa yang ada di Tanah Papua merupakan awal dari upaya menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Perjuangan mengembalikan harga diri dan diakui sebagai manusia yang sederajat merupakan tuntutan yang wajar bagi siapa pun di dunia ini. Di mata Tuhan Allah kita semua seharga dan semartabat! Kenyataan yang sama terungkap dalam **Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia**, yang berlaku universal sebagai pegangan “adat baru” dewasa ini.

Dalam sejarah penderitaan Bangsa Papua, harga diri dan pengakuan terhadap dirinya banyak berkaitan dengan perlakuan dan penilaian orang lain. Namun sebenarnya pengakuan dan harga diri juga banyak ditentukan oleh perilaku orang Papua sendiri. Kebiasaan buruk seperti masuk-keluar bar, tidak bekerja di kantor dengan baik, tidak mau kerja kebun, mabuk-mabukan dan sebagainya, turut merendahkan martabat orang Papua. Sudah saatnya untuk

*berjuang – melalui suatu penampilan yang menyakinkan – menghilangkan kebiasaan yang mendasari stigma sedemikian.*

*Mengangkat harga diri dapat diupayakan dengan menciptakan kegiatan sesuai potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Papua sendiri, seperti, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan adat yang sudah hampir mati atau menghargai dan merayakan hari-hari bersejarah bagi masing-masing suku-bangsa di Papua. Melalui perilaku hidup yang baik setiap hari, akan membantu menghilangkan cap-cap seperti: “orang Papua itu pemabuk, pemalas, bodoh, primitif”, atau “orang pendatang semua pencuri saja”, sambil berjuang untuk keluar dari segala bentuk penindasan yang memang menjadi salah satu akar masalah dari berbagai pengalaman pahit yang dialami selama sekian tahun. Disamping itu, melalui peningkatan mutu penampilan orang Papua di dunia ekonomi, sosial dan politik, sikap percaya diri serta harga diri akan bertumbuh kembali dan pengakuan terhadap eksistensi orang Papua akan terwujud.*

unsur kegiatan

Hilangkan bahasa yang memberi suatu cap buruk kepada orang. Diakui dengan mengakui orang lain. Upaya memahami orang lain, budayanya, pikirannya, pendapatnya. Memperingatkan hari-hari bersejarah untuk suku/bangsa. Menilai ulang adat sambil terbuka pada dunia sekarang ini. Menata kembali bentuk-bentuk kehidupan yang kurang dapat dibanggakan (mabuk dll.). melibatkan kaum perempuan sebagai mitra hidup semartabat. Mengasahi diri dan mencintai tradisi yang baik. Jalan, dan tempat umum lain diberikan nama setempat. Mengaktifkan budaya / seni setempat. Membiasakan diri dengan makanan lokal. Penggunaan obat-obat tradisional. Perlombaan cerita-cerita budaya. Memanfaatkan tradisi / seremoni lokal untuk mengatasi konflik. Pencegahan pemakaian narkoba, seks bebas dsb. Pengangkatan unsur religiusitas asli Papua.

## **KEUTUHAN / HARMONI**

*Kita termasuk salah satu dari seluruh kesatuan semesta alam dan kita merupakan bagian kecil dari seluruh ciptaan yang ada. Dalam kesatuan itu kita mengakui bahwa alam semesta merupakan tempat tinggal satu – satunya, yang oleh Sang Pencipta diatur dalam satu tatanan yang indah. Maka tidak mengherankan jika berabab – abab lamanya alam semesta dihayati dan dijaga melalui warisan tradisi-adat manusia. Sejak dahulu hal ini telah disadari bahwa menjaga keberlangsungan hidup merupakan tanggung jawab kita; bagaimana agar kehidupan di “rumah kita” ini terus lestari dan tidak musnah ?*

*Gaya hidup kita belakangan ini berubah cukup drastis. Cara kita menggunakan tanah dan hutan yang sekarang cenderung berprinsip ekonomis-konsumtif, menebang, mencukur, merubah aliran sungai atau menutupnya, membongkar batu-cadas yang menahan tanah dan melindungi mata air, dll. Cara kita membuat kebun, bakar dimana-mana, cara kita menangkap ikan; dengan menggunakan racun, dengan menggunakan alat peledak, dengan menggunakan jaring yang mampu menangkap ikan dari yang masih menjadi telur sampai yang paling besar, juga termasuk makluk lain yang tidak kita perlukan, dll. Kebiasaan lain*

*yang terbukti telah mengancam keselamatan kita juga adalah menjadikan semua tempat lingkungan kita sebagai tempat sampah; segala sesuatu yang telah dipakai seperti bungkus teh kotak, pinang, botol air vit, bungkus supermi, dan plastik – plastik dibuang dimana-mana. Ada yang melakukannya dengan sangat mencolok dengan melempar keluar dari kaca mobil; ada yang membuang begitu saja di dalam sungai atau melemparkannya ke dalam laut.*

*Jelaslah bahwa gaya hidup kita sekarang seperti telah disinggung sedikit di atas, tidak menunjukkan sikap terpeliharanya “rumah kita” ini; bahkan ada kesan kita cenderung menghancurkannya. Sikap memperhitungkan kehidupan bagi generasi mendatang kiranya merupakan salah satu sikap bijaksana yang harus dikembangkan terus – menerus, demi mempertahankan kelestarian hidup yang utuh dan harmonis.*

*Menyadari pentingnya keutuhan alam semesta dan kelangsungan hidup manusia dimasa depan, dituntut dari kita penghayatan yang benar dalam gaya kita memanfaatkan alam. Penghayatan akan keutuhan dan keharmonisan dalam rangka memelihara kehidupan perlu terungkap dalam relasi kita dengan Allah, / Misteri Hidup, dengan sesama dan relasi dengan alam. Dimana dihayati bahwa semesta alam termasuk manusia dengan berbagai latar belakang suku, ras dan kepercayaannya merupakan ciptaan Allah. Untuk itu dalam relasi antar manusia mesti dikembangkan sikap religiositas, sambil mengakui bahwa tidak ada satu agama atau kepercayaan pun yang menghendaki adanya kehancuran manusia. Sikap fanatisme suku dan agama akan merusak keharmonisan ciptaan yang kita yakini sebagai suatu misteri. Penghayatan sedemikian menggerakkan kita untuk mencintai sesama dan merawat lingkungan sekitar kita.*

unsur kegiatan

Membangun sikap religius: dalam hidup berkeluarga, dalam relasi dengan sesama, dalam hubungan dengan alam. Popularisasi konsep HAM sebagai “Adat Baru”, termasuk sikap damai, toleran, penghargaan hukum serta pengakuan hak setiap orang. Pelatihan “Adat Baru” di tingkat masyarakat akar rumput. Penyuluhan mengenai pelestarian alam dan lingkungan yang sehat (termasuk lingkungan sosial: bebas pemasaran seks, bebas perjudian, bebas minuman keras dsb.) pemantauan pengoperasian perusahaan-perusahaan besar dari segi dampaknya atas lingkungan. Melatih diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menggali tradisi pelestarian lingkungan/alam dan mengakui peraturan tradisional secara hukum. Pengembangan teologi yang berakar dalam kebudayaan serta konsep keutuhan ciptaan.

## **BAB IV**

### **MEMBANGUN BUDAYA REKONSILIASI**

#### **Suatu catatan awal**

*Membangun budaya damai ternyata menyangkut segala macam hal yang praktis, menyangkut upaya-upaya manusia yang bertujuan untuk memperbaiki suasana hidup bermasyarakat yang telah dalam keadaan rusak. Hasilnya tergantung dari tingkat upaya kita sendiri karena kerusakan pun adalah hasil dari tindakan manusia sendiri.*

*Pada bagian terakhir ini kami menawarkan suatu unsur tambahan – jika dapat dikatakan: semacam ‘nilai plus’ - yakni: membangun budaya rekonsiliasi. Membangun budaya rekonsiliasi juga untuk sebagian besar bergantung pada upaya kita, namun sekaligus menyentuh pada suatu realitas dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat yang ternyata diluar jangkauan kita, melampaui ‘urusan kita’.*

*Kami coba jelaskan dengan suatu bahasa yang lebih sederhana. Memperbaiki pendidikan sehingga dapat menunjang pengembangan kepribadian para warga secara merata menuntut suatu kegiatan perencanaan yang matang, kebijakan yang mantap, suatu kemauan politik yang nyata dan jernih. Pendek kata, semuanya tergantung dari kesungguhan orang yang diberikan tanggungjawab dalam hal ini. Lain halnya kalau kita berhadapan dengan seorang ibu yang sangat terlukai karena anaknya dibunuh begitu saja dan sembarangan menjadi korban suatu konflik ideologis atau sejenisnya. Ibu ini mau apa? Ia merasa tidak berdaya, merasa tidak diperhitungkan, ia merasa tidak diperlakukan secara adil, merasa tidak diperlakukan sewajarnya, merasa dendam, ia merasa benci terhadap pihak yang merampas anak dari sisinya. Nah, bagaimana Ibu demikian dapat ‘membebaskan diri dari beban berat ini’ sehingga dapat merasa tenang kembali dalam kehidupan bermasyarakat? Sudah tentu perlu suatu proses yang panjang yang tidak begitu saja direncanakan tuntas oleh sesama manusia. Mungkin suatu suasana pendukung dapat diciptakan, namun akhirnya penyembuhan pada diri Ibu menjadi hasil suatu proses batiniah yang mengikuti suatu irama dan dinamika tersendiri, diluar jangkauan kita. Keberhasilan proses batiniah tersebut sering mengagumkan para pengamat. Seakan-akan terjadi mujizat pada diri korban. Keberhasilan upaya batiniah ini dan keberadaan kekuatan batin dalam diri, sering disebut ‘karya Allah sendiri’. Karena itu, mengangkat “budaya rekonsiliasi” berarti kita memasuki suatu medan yang sangat kaya sekaligus rumit. Rekonsiliasi yang sejati ternyata akhirnya merupakan hasil suatu penghayatan kesatuan antara manusia dan Allah sendiri, atau penghayatan akan kekuatan keallahan dalam diri kita.*

## **REKONSILIASI**

*Di tengah-tengah dunia yang penuh pertentangan ini kita hanya dapat menantikan suatu peningkatan jumlah konflik (termasuk yang berdarah), bertambahnya orang yang disingkirkan (masyarakat yang marginal), peningkatan jumlah pengungsi yang membanjiri “negara-negara yang aman dari segi politik dan ekonomi”, meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah-wilayah perkotaan yang tidak memiliki suatu infrastruktur yang memadai untuk menampung mereka. Jelas bahwa banyak tantangan akan kita hadapi. Dan sebagai “lembaga sosial” atau “lembaga gereja”, apa yang dapat kita sumbangkan?*

*Menjawab pertanyaan tersebut diatas sering dimunculkan kata “rekonsiliasi”. Pemahaman atas kata rekonsiliasi itu banyak. Bagi sejumlah orang rekonsiliasi berarti: suatu seruan untuk mengakhiri kekerasan dan perpecahan; bagi lain berarti: membangun kembali suatu masyarakat setelah mengalami suatu reruntuhan dan konflik yang hebat; bagi yang lain lagi: suatu seruan untuk melupakan masa yang lampau serta segala bentuk ketidakadilan dan menyarankan bahwa hal demikian tidak boleh terjadi lagi, malahan akan berubah menjadi masyarakat yang baru.*

*Ada banyak arti tetapi tidak selalu tepat. Mungkin yang menyatukan semua pengertian ialah perasaan bersama bahwa perpecahan serta konflik-konflik yang begitu menandai masa kini jelaslah tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebagai “dunia manusiawi”, “dunia yang dicita-citakan”. Pastilah ada suatu cara melihat dunia dan membangun dunia yang lebih mengungkapkan rasa kebersamaan kita. Itulah suatu keyakinan / harapan inti yang ada di belakang kata ‘rekonsiliasi’ itu. Itu berarti bahwa apa yang kita inginkan bukanlah suatu “suasana damai yang murahan”. Rekonsiliasi bukan sesuatu yang mudah dan cepat tercapai. Melainkan suatu proses yang penuh susah payah untuk meresapi apa yang terjadi di masa yang lampau dan menciptakan suatu dunia baru dimana “penderitaan masa lampau” tidak akan terjadi lagi. “Jangan terjadi lagi seperti dulu!”. Itulah nada dasar perjuangan yang tersirat dalam perwujudan rekonsiliasi.*

## **PEMAHAMAN REKONSILIASI SECARA UMUM**

*Konsep **REKONSILIASI** adalah suatu konsep yang sangat padat. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai: pencapaian suatu kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku untuk menyelesaikan konfliknya, membuat damai, berjabat tangan, dan meminta maaf seraya memberikan ‘ganti rugi’. Rumusan itu memang sangat sederhana saja, tetapi prosesnya ternyata jauh lebih kompleks karena menyangkut baik nilai mental seperti penerimaan apa yang ada (kenyataan tidak ditolak baik oleh korban maupun pelaku yang salah) nilai duniawi (misalnya ganti rugi) dan unsur rohani (misalnya pertobatan atau peneguhan). Rumusan singkat lain adalah: “ampunilah tetapi jangan melupakan” (forgive but*

*don't forget*<sup>8</sup>). Artinya, bahwa kita dapat melangkah maju, namun jangan sampai melupakan sejarah tragedi kemanusiaan kita (ingatan kita bersama; *memoria passionis*) supaya apa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Aspek penting lainnya adalah kaitan antara suatu rekonsiliasi di tingkat pribadi dan rekonsiliasi di tingkat tatanan sosial (tatanan hukum dan aplikasinya secara umum) pada umum; atau dengan kata lain terdapat hubungan erat antara dampak pada pribadi orang, dampak pada struktur masyarakat serta struktur kekuasaan.

Proses rekonsiliasi dimaksudkan untuk memulihkan kembali suatu suasana kemasyarakatan dimana satu dengan yang lain, korban dengan pelaku / penindas, dapat berjumpa kembali dan "maju bersama". Karena itu, maksud inti proses Rekonsiliasi adalah untuk memperbaiki, dan membantu siapa saja, terutama korban-korban, untuk mengolah pengalamannya yang pahit sehingga tidak menjadi suatu beban berat lagi dalam menata hidupnya di masa depan.

Proses rekonsiliasi ini memang sangat dibutuhkan, bahkan sudah mendesak. Di Tanah Papua terdapat sejarah penderitaan sebangsa (*memoria passionis*). Selain di tingkat 'bangsa', banyak penderitaan langsung melekat pada pribadi orang sehingga menjadi sejarah pribadinya. Sejarah penderitaan ini menimbulkan penderitaan jasmaniah dan kejiwaan bagi orang yang mengalaminya. Mereka merasa dendam dan benci - yang sering tersimpan di dalam hati setiap orang - terhadap pihak-pihak yang mendatangkan penderitaan baik secara fisik maupun melalui kebijakan-kebijakan oleh pihak lain. Ada rasa takut yang kemudian menimbulkan gangguan kejiwaan (trauma), ketidakstabilan mental, rasa rendah diri dalam diri mereka yang mengalami pelanggaran HAM. Akibatnya korban tidak dapat merasa betah lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain di tingkat pribadi, situasi penderitaan yang bersifat traumatik tersebut juga berpengaruh di tingkat kolektif.

Berdasarkan kenyataan itu, menjadi jelas bagi kita semua bahwa kita tak berdaya selama tetap berpijak pada kepentingan masing-masing kelompok. Masalah yang kita hadapi bukan lagi masalah kelompok, bukan lagi masalah bangsa, melainkan masalah kemanusiaan. Karena itulah diperlukan satu langkah besar yang menuntut keikhlasan seluruh pihak untuk menanganinya bersama.

Rekonsiliasi bukan sesuatu yang hanya menyangkut pribadi-pribadi orang sampai mereka secara pribadi merasa 'utuh kembali', melainkan juga langsung berkaitan dengan suatu perubahan sejati dalam tatanan kemasyarakatan – terutama dalam tatanan hukum dan politik serta penerapannya - yang pernah menyebabkan terjadi penderitaan yang begitu hebat. Dengan kata lain, tidak cukuplah suatu penyelesaian di tingkat pribadi orang, melainkan perlu ada dampak pada tingkat struktural, seperti di tingkat perundangan dan di tingkat penegakan hukum. Unsur ini sangat sentral dalam proses rekonsiliasi, karena perubahan tatanan sosial (struktural) menjadi jaminan utama bahwa 'sejarah tidak akan terulang'. Rekonsiliasi tanpa unsur perbaikan struktural adalah suatu proses yang tidak lengkap.

---

<sup>8</sup> Bdk. Buku yang ditulis oleh Uskup Desmond Tutu mengenai proses rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang berjudul: "Tiada masa depan tanpa pengampunan". [Tutu, Desmond, 1999, "No Future Without Forgiveness", London, Ryder Publication]

### **Aspek-aspek rekonsiliasi**

Mengingat bobot masalah memang sangat berat, proses rekonsiliasi yang mau dijalankan pasti bukan sembarang proses. Hal ini menjadi jelas kalau kami mencoba merincikan beberapa aspek yang perlu dicermati, seperti berikut:

1. Kaum atau pribadi korban diberi kesempatan untuk mengutarakan nasibnya secara terbuka, tanpa terancam, dan diberikan kesempatan untuk memahami latar belakang persoalan yang menimbulkan terjadi penderitaan terhadap dirinya;
2. Kaum atau pribadi korban diajak bicara supaya dia bisa merasa lega sekaligus bisa memulai suatu proses penyembuhan “luka batin” secara pribadi;
3. Penyembuhan “luka batin” yang dimiliki oleh masing-masing korban sering tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan nyata terhadap pelaku / penyebab luka-luka itu; melalui kompensasi atau tindakan lainnya;
4. Yang menjadi aktor dalam segala penyiksaan juga diajak untuk menjalani suatu proses yang sama dengan si korban; pelakupun diberikan kesempatan untuk menjelaskan pada diri sendiri maupun pada masyarakat umum, apa yang dia lakukan dan mengapa dia sampai melakukan tindakan tersebut; dia pun perlu membebaskan diri dari suatu beban yang berat, menuju suatu proses penyembuhan yang sama dengan si korban;
5. Proses rekonsiliasi perlu menciptakan suatu suasana dimana kedua belah pihak merasa “dihargai” dan sebagai konsekuensi - risiko hukuman - perlu ditetapkan secara jelas dan pasti sebelumnya, seperti ganti rugi, dan hukuman lainnya;
6. Dari proses “membuka secara luas sejarah yang pahit” diharapkan juga bahwa bukan saja suatu dampak penyembuhan akan terjadi pada pribadi-pribadi orang (korban maupun pelaku) namun juga pada “tertib / tatanan kemasyarakatan” pada umumnya (perbaikan tatanan sosial) sehingga apa yang terjadi di masa yang lampau tidak akan terulang;
7. Hasil proses rekonsiliasi perlu dijadikan “milik umum”, sehingga perlu diterbitkan dalam suatu laporan yang lengkap dan tidak menyembunyikan kenyataan manapun. Adanya laporan demikian sangat penting karena akan menyumbang secara sangat berarti pada proses penyembuhan melalui tiga sarana utama: [1] sejarah penderitaan di tingkat pribadi orang maupun di tingkat masyarakat akhirnya terungkap, dan hal itu sangat penting bagi para korban (mereka akhirnya didengar!); [2] dengan adanya laporan publik ini kalangan masyarakat yang “sampai saat ini menjadi penonton saja” diberi kesempatan untuk memahami sejarah para korban; dan [3] dengan mendukung pengadaan suatu laporan publik pihak penguasa dengan sendirinya mengakui bahwa banyak hal telah ditangani secara salah oleh mereka sendiri di masa yang lampau.

### **Rekonsiliasi sosial**

Yang menjadi pusat perhatian kita selanjutnya adalah suatu proses rekonsiliasi yang boleh dikatakan agak bersifat “perorangan”. Hal demikian tidak mengurangi kepentingan yang perlu diberikan pada suatu proses rekonsiliasi sosial. Dengan rekonsiliasi sosial dimaksudkan “suatu pemulihan kembali tatanan kemasyarakatan moral sedemikian rupa sehingga apa



yang terjadi sebagai kejahatan di masa yang lampau tidak akan jadi di masa mendatang.” Untuk menjalankan proses demikian, perlu:

- (a) mencari kebenaran mengenai masa yang lampau (**mencari kebenaran**)
- (b) mencari tahu keadilan mana perlu ditegakkan (**mencari keadilan**), dan
- (c) mencari dan berjuang menciptakan suatu masa depan yang lebih adil (**menciptakan harapan dan peluang hidup**).

Aspek-aspek ini telah dikemukakan di depan dimana kami menyinggung mengenai isi suatu proses rekonsiliasi secara umum.

## **PEMAHAMAN REKONSILIASI SECARA KRISTIANI**

Suatu pemahaman mengenai lingkup rekonsiliasi Kristiani (ala Yesus) dapat kita simpulkan dari penampilan Yesus yang telah bangkit. Menurut Robert Schreiter<sup>9</sup> ada lima ciri khas yang mewarnai pemahaman kristiani mengenai rekonsiliasi.

### **[1] rekonsiliasi adalah suatu karya Allah**

Rekonsiliasi akhirnya bukan suatu hasil karya manusia melulu, melainkan karya Allah didalam diri orang. Karya rekonsiliasi terlalu besar dan terlalu mendalam untuk menjadi hasil keringat kita sendiri. Penderitaan yang mau diatasi sebenarnya terlalu besar untuk ditiadakan. Bagaimana misalnya mengadakan rekonsiliasi berkaitan dengan semua yang sudah mati karena kekerasan, dan yang sekarang sudah tidak bisa terjangkau lagi? Bagaimana masa depan bagi anak-anak yang sudah ditandai ‘seumur hidup’ dengan pengalaman kekerasan? bagaimana masa depan mereka masih dapat dipulihkan kembali?

Untuk mengerti artinya “karya Allah” didalam proses rekonsiliasi perlu kita lihat pertama-tama pada suatu paradoks di dalam rekonsiliasi sendiri. Kalau kita membicarakan rekonsiliasi kita secara spontan memikirkan pertobatan oleh orang yang membuat kesalahan, yang kemudian meminta ampun pada yang menjadi korban dari kelakuannya. Namun dalam “rekonsiliasi karya Allah”, proses tidak mulai dengan si penjahat, namun dengan korbannya. Allah mulai dengan memulihkan kembali kemanusiaan serta martabat si korban; memulihkan suatu kemanusiaan serta martabat yang pernah dirampas oleh penjahat melalui kekerasannya. Pemulihan kembali “kemanusiaan” adalah inti dalam rekonsiliasi ala Yesus. Suatu pemulihan kemanusiaan yang pernah dirugikan / dihancurkan menjadi utuh kembali sehingga menjadi sumber hidup lagi. Dalam pemulihan hubungan itu si korban sekali lagi bisa menjadi “gambar dan rupa Allah sendiri” (Kej. 1,26).

Allah bekarya melalui korban-korban. Melalui korban akhirnya juga si penjahat dapat dipanggil untuk bertobat dan menerima ampun. Salah satu “pertentangan intern lain” lagi dalam pemahaman kristiani mengenai rekonsiliasi adalah bahwa ‘pertobatan dan

---

<sup>9</sup> Schreiter C.P.P.S., Robert, 1998, “The Ministry of Reconciliation”, *Spirituality & Strategies*, New York; Orbis Books, Maryknoll.

*pengampunan' tidak merupakan prasyarat-prasyarat suatu rekonsiliasi, melainkan suatu hasil / dampak dari rekonsiliasi. Hanya si korban yang sekali 'dipulihkan' mampulah untuk memahami apa artinya pengampunan. Dengan demikian korban-korban menjadi pemimpin-pemimpin suatu proses rekonsiliasi, karena merekalah yang memiliki suatu visi yang melingkupi baik rasa sakit mengenai masa yang lampau maupun harapan akan suatu masa depan yang lebih cerah.*

**[2] lebih daripada suatu strategi, rekonsiliasi adalah suatu spiritualitas.**

*Kalau memang proses rekonsiliasi adalah suatu karya Allah, kita sendiri tidak lain daripada Duta Allah (2 Kor. 5,20). Rekonsiliasi tidak lain merupakan pengembangan suatu hubungan yang akrab dengan Allah yang telah memulihkan kembali "kemanusiaan kita". Kita pada gilirannya menjadi sarana mengadakan rekonsiliasi di tengah-tengah masyarakat kita. "Sarana" itu menciptakan ruang untuk mengisahkan kebenaran, untuk mengatasi segala kebohongan di masa yang lampau; sarana itu menciptakan kelaparan kita akan keadilan yang bukan mencari dendam / membalas pada pelaku-pelaku kejahatan, namun yang memungkinkan supaya tatanan masyarakat berubah. Sarana itu menyembuhkan dan mengubah ingatan kita menjadi dasar untuk suatu masa depan yang lebih baik, dan bukan untuk melupakan saja apa yang pernah terjadi di masa yang lampau. Dalam mengampuni kita tidak melupakan melainkan kita akan mengingatnya secara berbeda ("in forgiving, we do not forget; we remember in a different way"). Yang pernah menjadi korban, sekarang menjadi Duta Damai dan penyembuh. Merekalah yang mengantar kita masuk kedalam 'masa depan'*

*Oleh karena itu, rekonsiliasi bukan suatu strategi, namun pertama-tama suatu hubungan yang kaya dengan Allah, yang dimungkinkan oleh sikap berdoa, sikap menjunjung tinggi kebenaran, sikap penyembuhan dan damai. Inilah spiritualitas yang mendorong kita membayangkan (serta mewujudkan) suatu masa depan yang menyelamatkan.*

**[3] penghayatan suatu rekonsiliasi 'mengubah' baik korban maupun pelaku kejahatan menjadi suatu 'ciptaan baru'.**

*Pengalaman akan proses rekonsiliasi mengantar kita ke suatu tempat yang baru; kita tidak kembali pada apa yang menjadi suasana hidup kita sebelumnya. Apa yang telah jadi diubah, menjadi baru. Kita tidak perlu melupakan apa yang terjadi di masa yang lampau dan yang lama menjadi suatu beban yang mengikat kita pada masa penderitaan itu. Kita tetap mengingatnya, namun melalui proses rekonsiliasi 'sifat beban' telah dihilangkan, hingga kita tidak dilumpuhkan lagi oleh beban itu; namun justru menjadi suatu pengalaman yang membantu kita untuk membuka suatu halaman baru, suatu masa depan yang lain. Bagaimana transformasi ini terjadi dapat dibaca dalam Yoh. 20, dimana Yesus menampakkan diri pada Thomas. Yesus masih dapat menunjukkan luka-lukanya, namun luka-luka itu tidak lagi membawa suatu kematian, namun justru menjadi "sumber hidup baru" yang membantu Thomas untuk keluar dari kebingungannya sampai dia dapat mengakui Yesus sebagai Allah dengan sebulat hati. Luka-luka menjadi 'tempat penyembuhan'. Maka dia bisa maju dan mengejar suatu masa depan yang baru. Korban-korban yang pernah mengalami 'rahmat rekonsiliasi' demikian sering mengatakan bahwa rekonsiliasi ini,*

*transformasi terjadi tiba-tiba sebagai sesuatu yang tak terduga. Suatu pemberian, atau dalam bahasa teologis disebut suatu “rahmat”. Pengalaman demikian membuat mereka bergairah untuk maju untuk percaya pada suatu zaman yang baru.*

**[4] melalui cerita mengenai penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus kita dapat memahami “kemanusiaan yang baru” yang diciptakan melalui proses rekonsiliasi.**

*Kisah penderitaan serta kematian Yesus, kalau diceritakan dari sudut kemanusiaan, adalah suatu cerita kegagalan dan perendahan. Dialah yang mengotbahkan keselamatan tidak mampu menyelamatkan diri! Itulah juga cerita dan pemahaman yang meresahkan kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Hanya pada saat seorang ‘asing’ menceritakannya dari sudut kebangkitan, mereka mulai ‘hidup kembali’. Banyak orang kristen yang mengalami proses rekonsiliasi menonjolkan kembali cerita Emmaus ini, karena bagi mereka ada kesamaan dalam pengalamannya. Cerita Emmaus membantu banyak korban untuk memahami apa yang terjadi dengan mereka, dan bagaimana Allah mengantar mereka sekarang. Cerita lain misalnya dalam Yoh. 21, 1-17.*

*Ketika kita mendengar kisah-kisah penderitaan seperti di Timor Leste beberapa tahun lalu, atau yang di Ambon, Kalimantan, Poso, Aceh dan Papua, kita merasa kewalahan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana mengubah para korban. Cerita mengenai apa yang terjadi dengan Yesus memberikan jalan kepada orang kristen untuk mengatasi rasa tidak berdaya itu. Memang tidak mudah untuk dihayati! Melalui penampakan Yesus – yang sendiri menjadi korban pembunuhan - kita diajak untuk memahami bagaimana Allah berkarya guna memutarbalik nasib dewasa ini, dan bagaimana dia menciptakan suatu ciptaan baru dari penderitaan. Kita diajak! Syukurlah kalau kita sampai memahami karya-Nya!*

**[5] proses rekonsiliasi baru bulat dijalankan saat seluruh dunia bersatu.**

*Karya rekonsiliasi mungkin tidak pernah selesai, karena baru bulat sesaat semuanya menjadi satu / utuh dalam damai Ilahi. Kesadaran akan kenyataan demikian tidak mengurangi pentingnya atau perlunya usaha-usaha yang dilakukan manusia. Boleh saja seluruh karya rekonsiliasi diarahkan oleh rahmat Allah dan pembulatan adalah dalam tanganNya, namun Dialah yang tetap membutuhkan manusia untuk menjalankannya, untuk menjadi saranaNya. Memang yang diminta adalah sikap kerendahan hati, dan kesadaran akan keterbatasan kita, namun apa yang dapat dicapai didalam keterbatasan ini tetap sangat berharga, dan ‘mutlak’ perlu dijalankan kalau kita setia pada misi seorang kristen.*

## **BAHAN REFLEKSI BERSAMA<sup>10</sup>**

Kami mengakhiri uraian kami dengan menyajikan suatu 'model refleksi' yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin bergumul dengan makna "membangun budaya rekonsiliasi". Titik tolak adalah cerita yang dikisahkan Penginjil Yohanes, dalam Bab 21, 1-17. Alangkah baiknya membaca kisah itu sambil (1) menganalisa aspek-aspek rekonsiliasi yang terdapat dalam cerita itu, dan (2) menarik kesimpulan mengenai cara menjalankan "pelayanan rekonsiliasi"

Cerita penampakan Yesus pada murid-muridnya di Danau Tiberias sangat menarik dari sejumlah segi:

[1] dari segi suasana "patah semangat" (kecewa) para murid

= harapan tidak dipenuhi

= murid-murid sudah meninggalkan Jerusalem: karena takut? karena kecewa?

= kembali pada pekerjaan sebelumnya: menangkap ikan

= Petrus mengajak teman-temannya untuk memancing

= teman-teman ikut dengan senang hati: keluar dari suasana yang meresahkan

= 'Kisah Yesus' sudah tamat / selesai!

= namun tidak berhasil: mereka memancing seluruh malam namun tidak tangkap apa-apa; kembali kepada kehidupan sebelumnya ternyata tidak mungkin.

= mereka memikul 'beban masa yang lampau'

[bdk. orang yang pernah mengalami penyiksaan; mereka mau kembali kepada kehidupan yang sebelumnya -setelah keluar dari penjara misalnya- namun trauma mereka menghantui mereka; mau lupa, tidak bisa; apa saja -bunyi, kata, tanda- dapat mengingatkan kembali pada apa yang telah mereka alami, dan menghidupkan kembali penghayatan rasa sakit.]

[2] dari segi penyapaan awal / pertemuan awal

= seorang 'asing' muncul dan bertanya

= mereka disapa dengan kehangatan penuh: "anak-anak", yang mengungkapkan rasa cinta dan keprihatinan

= disarankan supaya mencoba lagi, namun di sisi lain dari perahu mereka

[bdk. dalam keadaan trauma murid-murid telah mencoba untuk kembali ke situasi normal, namun terus mencoba di "tempat yang sama"; tidak ada ruang mental untuk memikirkan pilihan lain; terpaksa dengan apa yang mereka tahu dari sebelumnya; Yesus mengajak mereka untuk melihat ke arah lain]

[3] dari segi mengenal kembali

= baru setelah mendapat banyak ikan, seorang murid kenal 'orang asing itu'

---

<sup>10</sup> Untuk bagian ini kami dibantu oleh tulisan Schreiter C.PP.S., 1998, hlm. 83-96.

= keluar dari 'obsesi' baru mereka mampu melihat "keselamatan" yang ada di sekitar mereka  
= Petrus lompat keluar dari perahu; spontan tanpa pikir panjang seperti 'dulu'  
= apa yang dipikir Petrus? orang yang pernah menyangkal Yesus, walau sebelumnya bersumpah untuk tidak pernah meninggalkannya... Akankah dia ditegur, dimarahi?

[4] dari segi suasana di pantai

= waktu murid-murid tiba di pantai, ada api dan makanan sedang disiapkan  
= Yesus mengajak mereka untuk "makan pagi"  
= murid-murid bungkam seribu bahasa; heran  
= Yesus bukan saja mengambil bagian dalam makan bersama, namun dia menyiapkannya  
= dia memberikan tanda "keterbukaan hati": keterbukaan hati untuk menerima orang; Yesus menjadi pelayan

[bdk. menyiapkan makanan serta mengajak orang untuk makan bersama, suatu kondisi khusus diciptakan; diciptakan ruang untuk mendengar cerita-cerita, dalam hal ini cerita-cerita dari orang yang sedih, yang kecewa, yang takut.

Setelah menciptakan suasana rekonsiliasi sewaktu dia 'memberikan perhatian atas usaha mereka untuk menangkap ikan' sambil mengikuti usaha itu dan mengajak mereka untuk mencoba 'cara lain' (langkah pertama), sekarang dia mengajak mereka untuk merasa tenang dan mulai bercerita (langkah kedua)]

**Dua unsur penting, unsur langkah awal dalam "pelayanan rekonsiliasi":**

**[1] menemani orang dalam perjuangannya/usahnya dengan segala ketenangan, kesabaran serta keterlibatan; memulihkan kembali kepercayaan mereka; kepercayaan terhadap orang lain.**

**[2] menciptakan suatu suasana dimana orang dapat merasa tenang, kerasan; keterbukaan hati.**

Yesus memasak makanan biasa, dan tidak lupa meminta ikan dari mereka sendiri, sehingga mereka merasa turut menyumbang pada makanannya. Makan bersama, salah satu sarana kebersamaan yang penuh arti. Bagi orang yang mengalami kekerasan, yang paling dibutuhkan adalah pemulihan rasa aman, penyapaan yang lembut, kepercayaan; dalam suasana itu komunikasi juga dipulihkan kembali. Keterbukaan hati juga menimbulkan suatu perasaan 'bersyukur', berterima kasih. Suatu suasana diciptakan yang memungkinkan rekonsiliasi.

Keterbukaan hati adalah pusat 'kegiatan rekonsiliasi' karena menyangkut: kesabaran dan mendengar; membuka jalan kepada "rahmat" yang akhirnya tidak lagi dalam tangan manusia. Namun keterbukaan hati ada dalam tangan kita! Penting bahwa bentuk keterbukaan hati terjadi dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh 'si korban'. Karena itu bentuk keterbukaan hati perlu mengikuti 'kebudayaan setempat'. Makanan yang sudah diketahui; pakai

sumbangan mereka sendiri; keterbukaan hati yang benar memper'hitungkan' baik harapan tamu maupun harapan penerima tamu.

### **Kelanjutannya**

Dalam suasana yang diciptakan dan setelah dinikmati penuh -selesai makan- Yesus "mengangkat kembali" pribadi orang Simon. Dia tidak menegurnya, tidak bertanya apakah dia masih kenal Yesus; tidak: dia menghadap Simon dengan satu pertanyaan saja: kamu mencintai saya? dan Simon seperti biasa dengan cepat, tanpa pikir panjang menjawab: jelas toh! Lantas Yesus pasti mengejutkan Simon dengan menyatakan: gembalakanlah domba-dombaku! Dengan demikian Simon diberikan tempatnya dalam hubungan dengan diri pribadi, maupun dengan jemaatnya.

### **Dua langkah tambahan dalam proses rekonsiliasi**

**[1] menghubungkan kembali orang dengan diri sendiri dan 'masyarakatnya'**

**[2] memberikan suatu penugasan (tugas dipercayakan; memberikan kepercayaan), suatu sasaran dalam hidupnya**

Banyak korban kekerasan akhirnya merasa diri terpisah dari masyarakat, terisolir, dan sulit untuk merasa 'tenang' lagi di dalam lingkungan mereka. Karena diberlakukan secara tidak manusiawi, mereka diberikan kesan, diberitahu bahwa mereka 'tidak laku' (bdk. betapa mudah orang Papua memakai kata-kata "kami diberlakukan sebagai binatang saja" ketika mereka bercerita mengenai apa yang diderita selama sekian tahun). Maka orang kehilangan harkatnya, martabatnya, harga dirinya, dan mulai merasa bahwa memang mereka tidak mempunyai tempat lagi di dalam masyarakat yang 'normal'. Salah satu langkah yang sangat penting adalah usaha untuk menghilangkan isolasi ini.

Memberikan kepercayaan, adalah langkah berikut. Entah bagaimanapun juga orang perlu dibantu untuk percaya diri lagi, untuk mampu mengingat masa yang lampau dalam suatu perspektif yang baru. Petrus pastilah menantikan ditegur karena telah menyangkal Yesus. Dengan cara yang dipakai Yesus, Petrus dapat menghayati bahwa dia diterima dalam segala kelhasan kepribadiannya, maka Petrus pun dapat menghayati 'dosanya' dalam suatu perspektif yang baru; tidak menjadi beban lagi, namun juga tidak dilupakan. Justru orang ini diberikan tugas untuk membimbing yang lain. Korban menjadi pendamping korban-korban lain<sup>11</sup>.

Yesus bertanya ulang sebanyak tiga kali. Petrus mungkin merasa tidak enak, karena ditanya terus. Schreiter menafsirkan cara itu sebagai suatu "ritual" yang penting. Pertanyaan tiga kali mengimbangi penyangkalan tiga kali. Ritual semacam ini sangat berarti dalam proses rekonsiliasi, karena:

---

<sup>11</sup> Suatu contoh lain dalam hal ini terdapat pada diri Michael Lapsley, seorang pastor anglikan yang menjadi korban kekerasan di Afrika Selatan. Lihat: Worsnip, Michael, 1996, "Michael Lapsley, Priest and Partisan", Ocean Press..

(a) ritual yang terulang hanya menggarisbawahi kepentingan mengenai apa yang terjadi, sekaligus membentangkan betapa sulitnya untuk “mengatasi” situasi yang telah ada. Menggarisbawahi betapa dalamnya luka yang dihadapi.

(b) ritual yang diulang-ulang membantu untuk menjawab suatu kebutuhan terus-menerus para korban untuk menceritakan kisah penderitaan mereka, dan untuk perlahan-lahan membuka kebenaran dalam segala aspek; korban-korban tidak pernah dapat berhenti mengisahkan ceritanya. (bdk. perayaan liturgi perjamuan akhir yang mengisahkan ulang perjalanan kehidupan Yesus).

(c) ritual juga membantu kita untuk menjembatani waktu. Dalam ritual kita diberikan kesempatan menghayati sekarang hal-hal yang terjadi jauh sebelumnya, dan mengarahkan kita kepada harapan untuk masa depan (hal-hal yang tidak boleh terjadi lagi).

(d) pemakaian ritual juga memungkinkan untuk memberikan bentuk pada pengalaman orang secara terbuka, buat masyarakat luas (bdk. seorang ibu yang meminta supaya didirikan suatu tugu peringatan untuk puteranya yang dibunuh ‘oleh Apartheid’ di Afrika Selatan. Tentu saja, tugu semacam ini tidak menghidupkan kembali anaknya, namun secara publik menjelaskan apa yang telah dibuat oleh Apartheid dan suatu lambang ingatan bagi generasi mendatang untuk menghindari hal yang sama). Ritual dapat membantu orang untuk “membersihkan masa yang lampau” sehingga dapat diingat dengan cara yang baru/berbeda (meresapi masa yang lampau sehingga dapat diingat dengan cara yang baru – bukan sebagai beban lagi).

### **PELAYANAN REKONSILIASI**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat langkah yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi:

1. menemani orang / memberikan hati, perhatian
2. keterbukaan hati (hospitalitas)
3. menghubungi orang kembali dengan diri sendiri dan komunitas
4. penugasan ke depan

Sebagai pelayan rekonsiliasi kita bisa amat berperan dalam kerangka dua langkah pertama; atau mungkin lebih tepat: kita diharapkan menjadi pro-aktif. Belajar bagaimana menjadi teman, dan bagaimana melalui “keterbukaan hati” menciptakan suatu suasana yang aman, kepercayaan, dimana orang dapat merasa tenang, diterima dan dapat memulihkan kembali penghargaan atas diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Kedua aspek ini dapat kita belajar, sampai menjadi lebih trampil, mampu menciptakan “komunitas rekonsiliasi”.

Komunitas rekonsiliasi mempunyai tiga aspek yang penting:

- a. menciptakan “tempat aman”, tempat-tempat dimana orang dapat merasa aman hingga dapat bercerita dan menguraikan luka-lukanya.
- b. menciptakan “tempat ingatan”; tempat-tempat dimana ingatan dapat [1] dibuka, ditemukan dan [2] dijadikan ‘milik bersama’ suatu masyarakat; untuk mengatasi suatu ingatan pahit masyarakat perlu sampai pada merumuskan suatu ingatan bersama, kalau tidak segala

*ketidakberesan dari masa yang lampau akan dilestarikan di masa mendatang. Tempat-tempat dimana orang bisa belajar untuk membicarakan kebenaran.*

*c. menciptakan “tempat harapan”; tempat-tempat dimana kita coba menanamkan benih suatu dunia yang lebih baik, yang lebih adil di masa mendatang. tempat-tempat dimana harapan akan suatu dunia baru dimana keadilan ditegakkan dan kebenaran dikisahkan secara jujur.*

*Hal-hal diatas kita dapat mengusahakannya sendiri; sedangkan langkah seperti “menghubungkan kembali dengan diri pribadi orang” serta “penugasan” merupakan bagian dari “rahmat”, sesuatu yang dapat terjadi karena kondisi mengantar orang ke situ, namun akhirnya perlu dibuat oleh para korban sendiri, atau akan terjadi pada mereka. Kita sendiri bukan tidak mungkin menjadi sarana perantara!*

**Jayapura, 10 November 2003**

**Sdr. Theo van den Broek ofm  
Sdr. Rudolf Kambayong ofm**